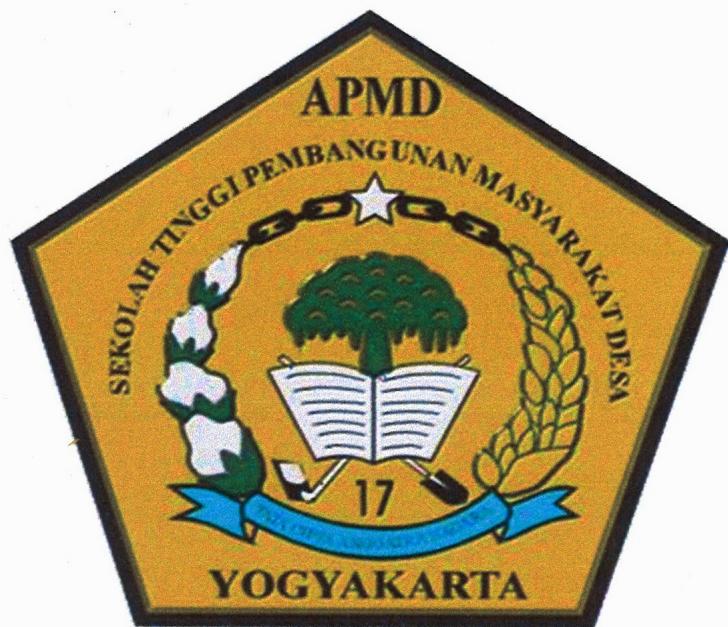


SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM
PENGELOLAAN EKOWISATA PANCOH



Disusun Oleh:

YOGA ARDIANSAH

18520045

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

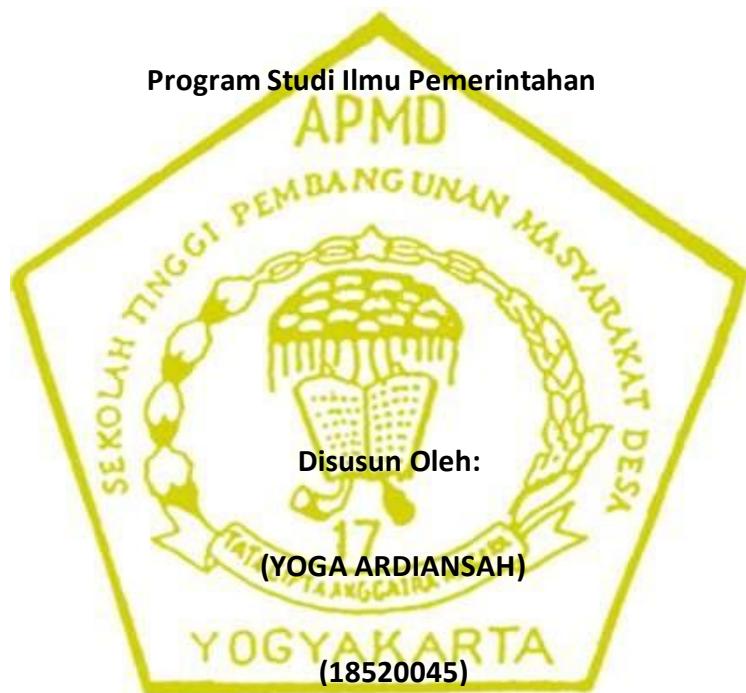
2024



**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM
PENGELOLAAN EKOWISATA PANCOH**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

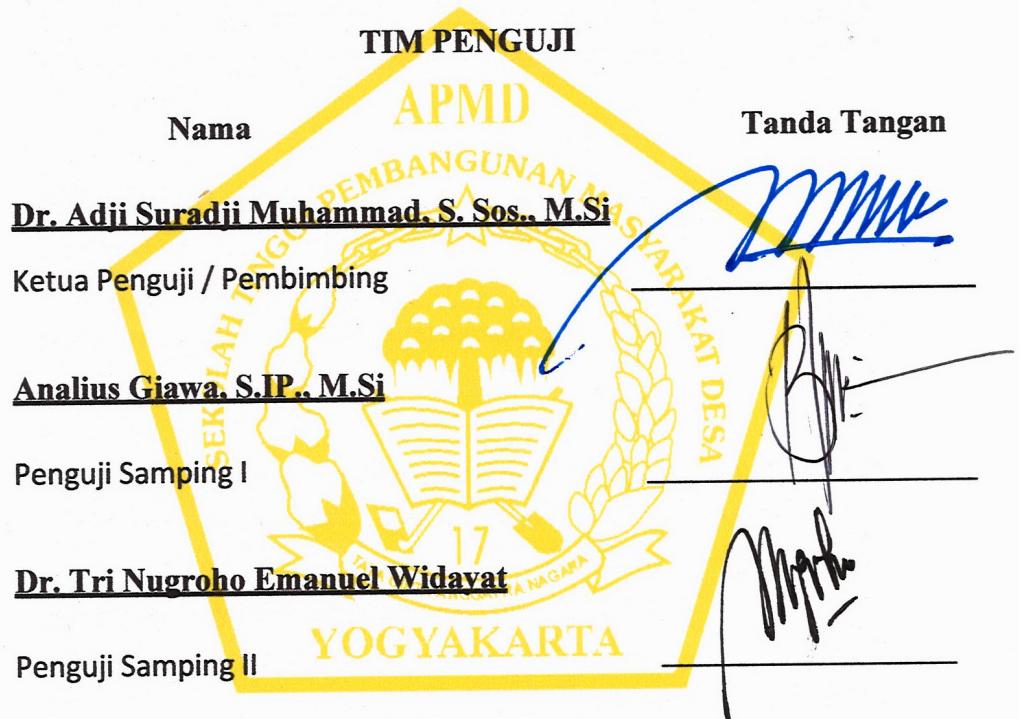
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2024

Jam : 09.30-11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Yoga Ardiansah
NIM : 18520045
Telepon : 082322798769
Email : Yogaardiansah375@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA PANCOH".

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan



Yoga Ardiansah
NIM. 18520045

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoga Ardiansah

Nim : 18520045

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul; "PERAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA PANCOH" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 25, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan



Yoga Ardiansah

18520045

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun dan disajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saya Yoga Ardiansah ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Mualil dan Ibu Siti Nurmah. Terimakasih telah menjadi pilar kekuatan dalam perjalanan pendidikan saya. Banyak kekecewaan yang saya berikan dan tidak banyak juga luka yang saya berikan untuk kalian. kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya dukungan, cinta, dan pengorbanan yang diberikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA PANCOH” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dikemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S. Sos., M.Si. selaku ketua penguji dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing saya dalam banyak hal sampai menyelesaikan Skripsi ini.
4. Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji 1 yang telah memberi saran kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
5. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji II yang telah memberi saran kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
6. Kampus STPMD “APMD” di Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.

7. Pemerintah Kalurahan Girikerto, masyarakat, dan semua narasumber yang telah membantu saya dalam proses penelitian yang saya lakukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak kekurangan baik bentuk maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi.

Yogyakarta, 25, Oktober, 2024

Yang Membuat Pernyataan

Yoga Ardiansah

18520045

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada
cahaya kemudahan. Karena itu bila kau telah
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada
Tuhan, Berharaplah.”

(Qs. Al Insyirah: 6-8)

“Kita bersaudara, tidak perlu saling tegang.
Surga itu terlalu luas sehingga tidak perlu
memonopoli surga hanya untuk diri sendiri.”

(M. Quraish Shihab)

“Ilmu menunjukkan kebenaran akal maka
barangsiapa yang berakal maka ia berilmu.”

(Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)

“Hidup bukanlah masalah yang harus dipecah, tetapi kenyataan yang harus
dialami, karena kenyataan tak seindah harapan. “

(Yoga Ardiansah)

INTISARI

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Girikerto sebagai fasilitator, regulator dan mitra kerja sama dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Penelitian ini berangkat dari Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364 Tahun 2020 yang menetapkan Kalurahan Girikerto sebagai “Desa Mandiri Budaya” pada tahun 2022. Kalurahan Girikerto yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata.

Untuk melihat lebih lanjut peran Kalurahan Girikerto dalam mengelola potensi ekowisata maka penulis mengajukan rumusan ialah yaitu, bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintegrasikan data di lokasi penelitian secara obyektif. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan juga studi dokumen yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Narasumber dari penelitian ini adalah Carik Kalurahan Girikerto, Pangripta, ketua BPKal Girikerto, ketua BUMDesa, bendahara BUMDesa, koordinator unit wisata Pancoh, dukuh, tokoh agama dan tokoh perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sangat krusial dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam memajukan partisipasi aktif masyarakat dan memberikan pendanaan serta pelatihan. Sebagai regulator pembuat kebijakan Kalurahan, pemerintah menciptakan keadilan, ketertiban dalam pengelolaan ekowisata dan menyediakan regulasi yang mendukung. sedangkan sebagai mitra kerja, pemerintah kalurahan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti POKDARWIS, BUMDesa, UMKM dan masyarakat Kalurahan.

Kata kunci: Peran, Ekowisata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Secara Akademik	7
2. Manfaat Secara Praktis	8
F. Kajian Literatur	9
G. Kerangka Konseptual	15
1. Pemerintah	15
2. Peran	19
3. Desa Wisata	25
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Objek Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian	35
I. Teknik Pengumpulan Data	36
J. Teknik Analisis Data	38
1. Pengumpulan Data	38
2. Reduksi Data	38

3. Penyajian Data.....	38
4. Kesimpulan atau Verifikasi Data	39
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK KALURAHAN GIRIKERTO	40
A. Sejarah Kalurahan Girikerto	40
B. Geografis	41
C. Demografis	42
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah.....	42
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	46
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	49
D. Potensi Kalurahan	50
E. Pemerintahan dan Lembaga	53
1. Badan Permusyawaratan Kalurahan	56
2. Badan Usaha Milik Desa	57
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	58
4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	59
5. Karang Taruna	61
6. AD/ART Desa Ekowisata Pancoh	63
F. Ekowisata Pancoh	65
1. Sejarah	65
2. Visi Misi	65
3. Potensi Wisata	66
4. Struktur Kepengurusan	67
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Informasi	69
B. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai fasilitator dalam pengelolaan ekowisata Pancoh	70
C. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai regulator dalam pengelolaan ekowisata Pancoh	75

D. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata Pancloh	80
E. Analisis Peran Pemerintah dalam pengembangan Ekowisata Pancloh	85
F. Analisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran	86
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
Daftar Pustaka.....	92

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Padukuhan	43
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	45
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	48
Tabel 2. 6 Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto	54
Tabel 2. 7 Pengurus BUMDesa Girikerto	55
Tabel 2. 8 Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	56
Tabel 2. 9. Pengurus TP-PKK	57
Tabel 2. 10 Pengurus Karang Taruna Kalurahan Girikerto	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ekowisata telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada pendekatan berkelanjutan untuk menghubungkan manusia dengan alam dan budaya, sambil menghasilkan dampak positif. Tujuannya adalah mendidik wisatawan tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan budaya melalui aktivitas seperti eksplorasi alam, penelitian lingkungan, tour budaya, dan program pelestarian. Ekowisata juga berupaya memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan peluang ekonomi berkelanjutan. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan pelestarian, sehingga menciptakan pengalaman berharga bagi wisatawan sambil menjaga lingkungan alam dan budaya yang ada serta mendukung masyarakat lokal. (Bloom dan Reenen, 2013)

Merujuk pada Nomenklatur DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, DIY sendiri memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di wilayahnya. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Kalurahan adalah mengembangkan potensi alam, sosial, dan budaya yang ada di daerahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang

menyatakan bahwa pemerintah kalurahan memiliki tugas dan kewenangan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya alam, sosial, dan budaya. Tanggung jawab ini mencerminkan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat kalurahan. Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam pengelolaan ekowisata, yaitu pariwisata yang berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan budaya.

Pemerintah Kalurahan, yang dipimpin oleh seorang lurah dan didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di tingkat kalurahan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan bidang pembangunan, dan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan.

Dengan demikian, pemerintah kalurahan memiliki peran kunci dalam mengelola ekowisata sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta warisan budaya di tingkat kalurahan.

Pemerintah Kalurahan memiliki kewenangan yang sah dalam mengelola dan mengembangkan potensi alam dan non-alam di wilayahnya. Potensi alam mencakup ekowisata dan pariwisata, sementara potensi non-alam melibatkan aspek sosial dan budaya. Pengelolaan potensi alam dan non-alam tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama jika dilakukan dengan baik oleh pemerintah kalurahan. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan

potensi-potensi secara berkelanjutan, menjaga lingkungan alam, dan mempromosikan warisan budaya lokal. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam hal ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat kalurahan serta pelestarian sumber daya alam dan budaya Indonesia. Pengembangan desa mandiri budaya dan ekowisata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat kalurahan, dan meningkatkan ekonomi lokal, pemerintah dapat mendukung pengembangan desa mandiri budaya dan ekowisata melalui kebijakan dan program yang tepat.

Dikutip dari *jogjaprov.go.id*, desa mandiri budaya adalah desa atau kalurahan yang memiliki ciri khas budaya dan potensi budaya yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik. Sementara itu, ekowisata merupakan bentuk pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan budaya. Melalui pemahaman kedua konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa mandiri budaya memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi ekowisata yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh adanya ciri khas dan potensi budaya dalam desa mandiri budaya yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, menegaskan bahwa salah satu faktor

pendukung Desa Mandiri Budaya adalah adanya potensi wisata alam yang menarik, seperti keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan mandiri budaya dan ekowisata saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan sambil menjaga kelestarian lingkungan.

Kalurahan Girikerto merupakan salah satu Kalurahan yang masuk dalam kelompok desa mandiri budaya. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364 Tahun 2020 yang menetapkan Kalurahan Girikerto sebagai “Desa Mandiri Budaya” pada tahun 2022. Keberhasilan Kalurahan Girikerto juga tercermin dalam peringkat terbaik Desa Mandiri Budaya tahun 2022 dari hasil monitoring dan evaluasi 18 Desa Mandiri Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberian status sebagai Desa Mandiri Budaya didasarkan pada empat faktor pendukung yang menjadi patokan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 Pasal 1 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Adapun empat faktor pendukungnya sebagai berikut: Potensi wisata alam yang menarik, pemetaan potensi wilayah yang efisien, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, potensi ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui pariwisata berkelanjutan. Keempat faktor ini menjadi pedoman yang harus dipenuhi oleh

desa atau kalurahan untuk memperoleh status sebagai Desa Mandiri Budaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya. Salah satu wilayah di Kalurahan Girikerto yang sudah mengembangkan pariwisata dengan tema ekowisata adalah Padukuhan Pancoh. Setelah proses pemulihan pasca bencana erupsi gunung merapi di Padukuhan Pancoh. Proyek desa ekowisata diresmikan pada tanggal 12 Februari 2012 dengan ditetapkan SK 17/KPTS.KD/GK/IX/2015, dikutip dari *ekowisatapancoh.com*.

Padukuhan Pancoh memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekowisata yang dapat dilihat seperti, pemandangan alam yang indah dengan nuansa kalurahan berlatar Gunung Merapi, persawahan yang membentang luas, sungai alam yang jernih, dan terjaganya budaya lokal seperti upacara adat, kesenian tradisional, dan kuliner tradisional. Namun potensi yang ada tidak di dukung dan dikelola dengan fasilitas yang memadai seperti terdapat kerusakan infrastruktur pasca-erupsi Merapi, Sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang kurang baik, peran pemerintah kalurahan kurang tanggap dan sadar melihat potensi ekowisata yang ada, inovasi ekowisata yang ada kurang maksimal.

Penelitian ini akan menganalisis peran Pemerintah Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh dengan Konsep “Political Will” akan ditekankan, mengacu pada tekad dan komitmen pemerintah dalam mengatasi dan mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di Padukuhan Pancoh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dalam menangani masalah

konkret yang ada, tetapi juga relevan dalam konteks pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di depan. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto dapat menjadi pelajaran berharga untuk pengelolaan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah serupa di seluruh Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi peran pemerintah girikerto, merujuk teori Budi Prasetyo (2019:1-10), Peran pemerintah dapat berupa penyediaan layanan publik, regulasi, dan pembangunan ekonomi. Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan mitra kerja. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi fokus penelitian sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Sugiyono 2017;207) fokus penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan ketepatan yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai fasilitator dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh
2. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai regulator dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh

3. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai mitra kerja dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diangkat diatas, peneliti mengangkat rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian secara objektif sesuai dengan kondisi nyata peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan sektor Ekowisata Pancoh.

1. Manfaat Secara Akademik

Penelitian ini bertujuan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu konsep peran pemerintah kalurahan dalam pengelolaan ekowisata.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori “*Governing*” khususnya dalam konteks peran pemerintah kalurahan dalam mengelola ekowisata di tingkat lokal. Dalam hal ini, penelitian ini berusaha untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemerintahan lokal dapat efektif mengatur sektor ekowisata yang kompleks. Dalam konteks ekowisata, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan kerangka konseptual yang relevan. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang tantangan khusus dalam pengelolaan ekowisata di tingkat kalurahan, terutama untuk interaksi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat lokal.

Penelitian ini juga mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Dalam kerangka governing yang membahas peran pemerintah kalurahan dalam pengelolaan ekowisata, penelitian ini membantu menjelaskan sejauh mana partisipasi masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan, implementasi program, dan dampak ekowisata terhadap masyarakat setempat.

Dengan adanya manfaat praktis ini diharapkan, penelitian dapat memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman teoritis tentang *Governing* dalam konteks peran pemerintah kalurahan dalam pengelolaan ekowisata. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan teori lebih lanjut, berkontribusi pada

literatur akademis, dan menjadi panduan bagi penelitian dan studi selanjutnya dalam bidang ekowisata dan pemerintahan lokal. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan akademis dan pemahaman tentang peran pemerintah kalurahan dalam pengelolaan ekowisata, serta mendorong perkembangan ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal dan lingkungan sekitarnya.

F. Kajian Literatur

Berikut beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi referensi untuk penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikodemus, pada tahun 2022, yang meneliti tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan ekowisata Danau Jemelak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa persepsi Pemerintah Desa Jerora Satu terhadap Ekowisata Danau Jemelak tergolong sedang namun disisi lain mereka meyakini bahwa ekowisata akan dapat menjadi salah satu pendorong pendapatan asli desa dia depan. Pembangunan infrastruktur penunjang Ekowisata Danau Jemelak belum ada namun dengan partisipasi semua pihak, penyediaan infrastruktur dapat tercukupi. Kebijakan pemerintah desa belum ada yang mendukung pengembangan Ekowisata Danau Jemelak, namun kebijakan adat yang sudah ada sejak lama dapat menjadi dasar dalam mendukung kelestarian wilayah Danau Jemelak dan aliran sungai di sekitarnya. (Nikodemus, Apriani, dan Atong 2020).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto, pada tahun 2020, yang meneliti tentang peran pemerintah dalam pengembangan Teluk Berdiri sebagai objek ekowisata di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa sebagian besar wisatawan yang mengunjungi Teluk Berdiri adalah wisatawan lokal, dari hasil penelitian tersebut peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut, antara lain, seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya promosi, dan aksesibilitas yang buruk. (Heriyanto, Debbie Yuari Siallagan, dan Sulaiman, 2020).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, pada tahun 2021, yang meneliti tentang, peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul, Lebak Banten. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola wisata belum maksimal dikarenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terpenuhi, selain itu terdapat beberapa faktor yang menghambat proses perizinan diantaranya sumber daya manusia yang minim akan pemahaman terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS), dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti akses internet yang sulit. (Susanti 2021).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Junaid, pada tahun 2020, yang meneliti tentang, peran pemerintah desa dalam pengelolaan Ekowisata Kampong Nelayan, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Peneliti menemukan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan ekowisata di desa wisata Kampong Nelayan, dimana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, regulator, dan mitra. (Junaid 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Leniwati, pada tahun 2021, yang meneliti tentang, pengelolaan Ekowisata Boon Pring oleh Badan Usaha Milik Desa, di Kalurahan Seno Kerto, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa BUMDesa Seno kerto telah memfasilitasi masyarakat desa untuk membentuk kelompok sadar wisata, melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan ekowisata, serta melakukan promosi ekowisata. Selain itu BUMDesa Seno kerto telah membuat peraturan desa yang mengatur pengelolaan ekowisata, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Dan BUMDesa Seno kerto telah mengelola ekowisata secara profesional, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDesa Seno Kerto telah menjalankan peran-peranya dengan baik yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan pengelola. (Leniwati dan Aisyah 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Patricia, pada tahun 2021, yang meneliti tentang, peran kelompok sadar wisata Nglanggeran dalam pengelolaan ekowisata di Kalurahan Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Nglanggeran memiliki peran yang

sangat penting dalam pengelolaan ekowisata di Desa Wisata Nglangeran. Dimana peran yang dilakukan oleh POKDARWIS berupa, pengelolaan objek ekowisata, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan objek ekowisata, serta peningkatan kualitas pelayanan, yang meliputi peningkatan kualitas fasilitas yang ada, sarana prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. (Amelia dan Patricia 2021)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Novita Sari dan Sudirman, pada tahun 2023, yang meneliti tentang, peran pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. peneliti menemukan bahwa peran pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, umumnya sudah berjalan dengan baik, namun terkendala oleh kesadaran masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya pengrusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau oleh masyarakat, seperti besi pada kursi yang banyak hilang, dan banyak coret coretan pada meja semen yang ada di ruang terbuka hijau. (Jihan Novita Sari dan Sudirman L. 2022).

Beberapa literatur yang telah dipaparkan peneliti ingin mengidentifikasi perbedaan dan persamaan masing-masing penelitian tersebut. Nikodemus menemukan bahwa Pemerintah Desa Jerora Satu memiliki persepsi yang sedang terhadap Ekowisata Danau Jemelak, namun meyakini potensi sebagai pendorong pendapatan desa.

Dalam konteks ini, peran pemerintah desa muncul sebagai penentu arah pengembangan ekowisata dan potensi penerimaan desa di masa depan. Heriyanto menyoroti hambatan pertumbuhan pariwisata di Teluk Berdiri, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya promosi, dan aksesibilitas buruk. Analisis ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan promosi sangat penting untuk mengatasi kendala tersebut.

Keterbatasan peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam: Susanti menemukan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam di Negeri di Atas Awan belum maksimal karena beberapa faktor, seperti kemandirian dan kesetaraan dalam Peraturan Daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, Regulator, dan Mitra: Junaid menemukan bahwa pemerintah desa di Kampung Nelayan memainkan peran penting sebagai fasilitator, regulator, dan mitra dalam pengelolaan ekowisata. Analisis ini menunjukkan pemerintah desa dapat berfungsi sebagai katalisator pengelolaan ekowisata yang sukses.

Pengelolaan Ekowisata oleh BUMDesa: Leniwati meneliti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mengelola ekowisata Boon Pring. BUMDesa Seno Kerto memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan sosialisasi, dan mengelola ekowisata secara profesional. Analisis ini menyoroti potensi peran BUMDesa sebagai pengelola ekowisata yang efektif dan berkelanjutan.

Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS): Penelitian Amelia dan Patricia menunjukkan peran kunci kelompok sadar wisata Nglanggeran dalam pengelolaan ekowisata. POKDARWIS berkontribusi pada pengelolaan objek wisata, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis ini menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata. Peran Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau: Jihan Novita Sari dan Sudirman meneliti peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Meskipun Pemerintah Kota sudah berperan melalui Dinas Lingkungan Hidup, terdapat kendala kesadaran masyarakat. Analisis ini menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga ruang terbuka hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan, pendekatan analisis “*Governing*”. Penelitian ini mencirikan pendekatan analisis “*Governing*” yang berfokus pada peran dan tindakan pemerintah dalam mengelola ekowisata. Adopsi pendekatan “*Governing*” dalam analisis peran Pemerintah Kalurahan Girikerto menunjukkan fokus pada dinamika pemerintahan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pengelolaan ekowisata. Ini dapat mencakup bagaimana kebijakan dan regulasi diterapkan, serta interaksi antara berbagai peran dalam pemerintahan. Lokasi Penelitian dari peneliti berbeda dengan kajian literatur, dimana penelitian ini dilakukan di Girikerto terkait fokus Ekowisata Pancuh. Lokasi penelitian yang spesifik ini menambah dimensi keunikan karena setiap lokasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaan ekowisata.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah

Pemerintah adalah badan atau institusi yang memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah negara untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, teruk ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Fungsi utama pemerintah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, membuat undang-undang, serta menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif. (Mulyawan,2022) Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan bagi warganya.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengelola sumber daya negara, seperti anggaran negara, tanah, air, serta sumber daya alam. Fungsi pemerintah juga melibatkan penegakan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak dan kepentingan warga negara. (Mulyawan,2018) Pemerintah yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah mencerminkan kepentingan masyarakat, menjaga keadilan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Teori pemerintah menurut (Sudiranata,2019) melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sifat dan peran pemerintahan dalam suatu negara. Dalam konteks ini, pemerintahan dianggap sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuatan

besar, dan perannya meliputi berbagai aspek penting dalam tata kelola negara.

Pemerintahan tidak hanya terlibat dalam pengelolaan urusan masyarakat, melainkan juga memiliki tanggung jawab teritorial yang melibatkan wilayah negara. Hal ini mencakup kebijakan terkait dengan penggunaan dan pengembangan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pemerintahan memainkan peran krusial dalam merancang kebijakan yang dapat memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan wilayahnya.

Selain itu, aspek penting lain dari teori ini adalah fokus pada urusan kekuasaan. Pemerintahan memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, baik secara internal maupun eksternal. Ini mencakup fungsi-fungsi seperti keamanan nasional, penegakan hukum, dan diploma internasional. Dalam konteks kekuasaan, pemerintahan juga bertanggung jawab untuk mengelola konflik dan memastikan perdamaian dalam masyarakat. Tujuan utama dari pemerintahan, menurut Sudiradinata, ialah mencapai tujuan negara.

Tujuan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga penyelenggaraan keadilan sosial. Pemerintahan dianggap sebagai lembaga yang memainkan peran strategis dalam merancang kebijakan dan mengambil tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran ini. Dalam teori ini, pemerintahan dianggap sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan

masyarakat, keberlanjutan wilayah, dan stabilitas kekuasaan.

Oleh karena itu, peran dan fungsi pemerintahan menjadi kunci dalam mencapai visi dan misi suatu negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang undangan baik tertulis maupun tidak.

Teori pemerintahan menurut (Astomo,2014) memberikan pemahaman mendalam tentang ragam bentuk sistem politik yang ada, yang mencerminkan variasi dalam organisasi dan pelaksanaan pemerintahan di berbagai negara. Sistem politik tersebut melibatkan bentuk pemerintahan seperti demokrasi, monarki, atau republik, dan memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat.

Dalam kerangka teori ini, demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang memberikan peran penting kepada rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Sementara itu, monarki menekankan pada keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan monarki atau keluarga kerajaan, dengan sejumlah varian, seperti monarki konstitusional atau absolut. Di sisi lain, republik

menekankan pada pemerintahan oleh wakil rakyat atau pejabat terpilih. Meskipun beragam dalam bentuknya, esensi dari pemerintahan, menurut Astomo, tetap terfokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang didasarkan pada kepentingan rakyat. Artinya, pemerintahan berfungsi untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat, baik dalam konteks demokrasi, monarki, atau republik.

Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, menjaga keadilan sosial, dan memastikan perlindungan hak-hak dasar warganegara. Dalam demokrasi, pemerintahan harus responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat, sementara dalam monarki dan republik, keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan juga harus dijalankan untuk menghasilkan pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sementara sistem politik mungkin bervariasi, esensi pemerintahan tetap berakar pada tanggung jawab dan komitmen terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini adalah Pemerintahan Kalurahan Girikerto Dimana Pemerintahan Kalurahan Girikerto adalah badan atau institusi yang memiliki wewenang tertinggi di wilayah tersebut untuk mengelola, mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan hukum, serta menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, hal ini mencakup tanggung jawab dalam mengelola wilayah Kalurahan Girikerto.

Pemerintahan Kalurahan Girikerto memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, guna kesejahteraan dan keamanan masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Girikerto juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya negara, anggaran negara, tanah, air, dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pemerintahan Kalurahan Girikerto juga harus berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah mencerminkan kepentingan masyarakat, menjaga keadilan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

2. Peran

Menurut (Soerjono Soekanto,2013), pemahaman mengenai peran adalah suatu aspek yang bersifat dinamis dalam konteks kedudukan individu. Konsep peran ini mencerminkan hubungan antara individu dan lingkungannya, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban yang melekat pada posisi atau kedudukan yang dimilikinya. Dalam pemahaman ini, Soekanto menekankan bahwa pelaksanaan peran terjadi ketika seseorang mampu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau perannya dalam suatu konteks sosial atau organisasional.

Aspek dinamis yang diungkapkan oleh Soekanto menyoroti fleksibilitas dan adaptabilitas individu dalam memainkan perannya. Sebagai contoh,

seseorang yang menduduki posisi manajerial dalam suatu organisasi memiliki peran yang berbeda dengan anggota timnya. Pemahaman yang dinamis ini mengakui bahwa peran seseorang dapat berubah seiring waktu, tergantung pada situasi, tuntutan lingkungan, dan perkembangan pribadi.

Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau peran tertentu menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat atau organisasinya. Melalui pemenuhan hak dan kewajiban ini, individu dapat menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam interaksi sosialnya, serta memberikan kontribusi yang sesuai dengan ekspektasi dari peran yang diemban.

Dalam konteks sosial, peran juga mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang terkait dengan posisi atau status sosial seseorang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran bukan hanya sekadar eksekusi tugas dan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap norma dan nilai yang mengarahkan perilaku seseorang sesuai dengan perannya dalam masyarakat atau organisasi. Dengan demikian, konsep peran menurut Soekanto menekankan pada dinamika hubungan individu dengan lingkungannya, dengan memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau peran yang dimiliki dalam suatu konteks sosial atau organisasional.

Menurut (Momon Sudarman, 2013), konsep peran tidak hanya berkaitan dengan pemahaman dinamis posisi seseorang, tetapi juga menyoroti proses

pembelajaran dan adaptasi individu dalam lingkungan masyarakat. Dalam perspektif ini, setiap orang dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan mengisi peran tertentu saat berinteraksi dalam skala masyarakat, baik itu dalam konteks kecil maupun besar. Pentingnya pembelajaran peran sosial tercermin dalam dua aspek utama yang diungkapkan oleh Momon Sudarman.

Pertama, individu dituntut untuk belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran. Ini menekankan bahwa peran tidak hanya bersifat pasif, tetapi melibatkan partisipasi aktif dalam menjalankan tanggung jawab yang melekat pada peran tersebut. Proses belajar ini melibatkan pemahaman tugas dan kewajiban yang harus diemban, serta kemampuan untuk menuntut hak sesuai dengan posisi yang diemban.

Kedua, peran sosial juga mencakup dimensi sikap, perasaan, dan harapan- harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pembelajaran peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan konkret, melainkan juga melibatkan aspek-aspek emosional dan psikologis individu. Sikap yang sesuai, perasaan yang terkait, dan harapan yang realistik terhadap peran tersebut menjadi bagian integral dari proses adaptasi sosial.

Pemahaman ini menciptakan kesadaran akan kompleksitas interaksi sosial, di mana individu tidak hanya dituntut untuk memahami peran secara teoritis, tetapi juga harus mampu menyesuaikan sikap, perasaan, dan harapannya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, pembelajaran peran sosial dianggap

sebagai suatu proses yang melibatkan pengenalan dan integrasi dua dimensi utama: tugas dan kewajiban serta sikap, perasaan, dan harapan.

Pembelajaran tentang peran melibatkan setidaknya dua aspek yang saling terkait. Pertama, individu harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak yang terkait dengan suatu peran. Dengan kata lain, pelaksanaan peran tidak hanya mencakup pemahaman akan tanggung jawab yang melekat pada suatu posisi atau peran, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan menegakkan hak-hak yang diberikan oleh peran tersebut. Ini menciptakan keseimbangan antara memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar dan menuntut hak yang adil sesuai dengan peran yang diemban.

Kedua, peran sosial juga mencakup dimensi sikap, perasaan, dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Hal ini menegaskan bahwa peran tidak hanya terbatas pada tugas-tugas konkret atau tanggung jawab formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional dan psikologis individu. Sikap yang sesuai, perasaan yang terkait, dan harapan yang realistik terhadap peran tersebut menjadi bagian integral dari keseluruhan proses interaksi sosial. Lebih lanjut, konsep peran, menurut Harton dan Hunt, menunjukkan pada suatu fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses.

Mereka menyatakan bahwa peran bukanlah entitas statis, melainkan dinamis dan berkembang seiring waktu. Peran juga mengandung harapan-harapan yang melekat, di mana individu diharapkan untuk bertindak dan berinteraksi dengan cara tertentu, sementara juga memiliki ekspektasi terhadap perilaku orang lain yang terlibat dalam peran yang serupa.

Dengan demikian, pandangan Harton dan Hunt melengkapi pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika peran sosial, menekankan pentingnya tidak hanya memahami tanggung jawab dan hak-hak yang terlibat tetapi juga membawa sikap, perasaan, dan harapan yang sesuai dalam setiap interaksi sosial.

Menurut Budi Prasetyo (2019:1-10), Peran pemerintah dapat berupa penyediaan layanan publik, regulasi, dan pembangunan ekonomi. Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu sebagai, fasilitator, regulator, dan mitra kerja.

Sebagai fasilitator adalah pemerintah yang berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana, memberikan bantuan keuangan, dan memberikan pelatihan. Sementara itu, yang dimaksud dengan peran regulator adalah, pemerintah berupaya menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dengan membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat. Selain berperan sebagai fasilitator dan regulator pemerintah juga berperan sebagai mitra kerja dimana yang dimaksud

dengan peran mitra kerja adalah, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, untuk mencapai upaya tersebut pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, swasta, dan organisasi non pemerintahan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan peran regulator adalah, pemerintah berupaya menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai kegiatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini adalah peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancoh, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kalurahan Girikerto harus berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancoh. Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dalam upaya pengembangan ekowisata di Padukuhan Pancoh.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana, dana, dan prasarana yang diperlukan, aksesibilitas ke lokasi ekowisata, memberikan bantuan keuangan, serta memberikan pelatihan kepada warga dan pelaku usaha di sektor ekowisata di Padukuhan Pancoh.

Dengan demikian, pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Selain menjadi fasilitator pemerintah desa juga harus

berperan sebagai regulator, dimana Pemerintah Kalurahan Girikerto bertanggung jawab menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengelolaan ekowisata. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekowisata, perlindungan lingkungan, izin usaha, standar keselamatan, dan aspek lainnya, dengan peraturan yang baik, pemerintah kalurahan telah menjaga keseimbangan antara pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan, serta melindungi kepentingan masyarakat setempat. Selain itu Pemerintah Kalurahan Girikerto juga harus berperan sebagai mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata.

Mitra kerja mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan ekowisata. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi pada semua pihak, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, dengan mempromosikan, dan berinvestasi dalam sektor ekowisata, agar tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di sektor Ekowisata Pancoh.

3. Desa Wisata

Desa wisata adalah konsep pengembangan pariwisata yang fokus pada upaya mempromosikan serta melestarikan budaya, tradisi, alam, dan kehidupan masyarakat lokal di suatu desa atau kawasan pedesaan. Ide utamanya adalah menghadirkan pengalaman yang autentik kepada para

wisatawan sehingga mereka dapat merasakan langsung kehidupan dan keunikan desa yang dikunjungi. (Syaiful Ade Septemuryantoro,2021)

Dalam praktiknya, desa wisata mencakup sejumlah unsur penting. Pertama, desa wisata menggabungkan pariwisata dengan nilai-nilai lokal, seperti budaya, seni, dan tradisi desa. Teori yang dikemukakan oleh Komariah, Saepudin, dan Yusup (2018) mengenai desa wisata membahas dua aspek utama yang melibatkan partisipasi lebih dalam wisatawan dalam budaya lokal dan tujuan pelestarian warisan budaya serta alam di desa tersebut.

Pertama, teori ini menyoroti fokus desa wisata pada pemberdayaan partisipasi wisatawan dalam budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Dengan memungkinkan wisatawan untuk terlibat lebih dalam dengan kehidupan lokal, desa wisata dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan berarti bagi para pengunjung. Hal ini bisa mencakup kegiatan seperti homestay, workshop kerajinan tradisional, serta festival budaya yang memungkinkan interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, teori ini merangsang pembentukan hubungan yang lebih erat antara wisatawan dan komunitas lokal.

Kedua, teori tersebut menekankan tujuan desa wisata dalam pelestarian warisan budaya dan alam. Ini mencakup upaya pelestarian dan pemeliharaan bangunan bersejarah, revitalisasi kesenian tradisional, pengembangan kuliner lokal, serta perlindungan terhadap lingkungan alam sekitar.

Dengan menjaga keberlanjutan warisan budaya dan ekosistem alam, desa wisata berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan dan melestarikan identitas kultural serta lingkungan di tingkat lokal. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menekankan pada aspek pariwisata sebagai industri, tetapi juga menggali potensi desa wisata sebagai agen pelestarian budaya dan alam yang penting. Pendekatan ini mengarah pada pembentukan destinasi wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dan merawat keberlanjutan lingkungan serta budaya lokal.

Selanjutnya Menurut (Nilasari, 2022) keberhasilan desa wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya adalah pengelolaan yang kompeten dan profesional. Poin ini menggarisbawahi pentingnya manajemen yang baik dalam mengelola aspek-aspek operasional, strategis, dan peran dalam konteks desa wisata. Beberapa faktor yang mungkin dapat diidentifikasi berdasarkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama Manajemen Kompeten, Keberhasilan desa wisata memerlukan kehadiran tim manajemen yang memiliki pemahaman yang baik tentang industri pariwisata, keterampilan manajerial yang kuat, dan pengetahuan yang cukup tentang budaya lokal. Manajemen yang kompeten dapat mengelola aspek-aspek seperti promosi, peran, keuangan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas dengan efektif.

Kedua pendekatan profesional, Pendekatan yang profesional dalam pengelolaan desa wisata melibatkan standar kerja tinggi, etika bisnis yang

baik, dan penekanan pada pelayanan pelanggan yang berkualitas. Tim manajemen yang profesional akan mendorong pencapaian standar operasional yang baik, meningkatkan pengalaman wisatawan, dan menjaga reputasi desa wisata.

Ketiga Rencana Pengembangan yang Jelas, pengelolaan desa wisata yang berhasil melibatkan perencanaan strategis yang matang. Rencana pengembangan harus mencakup visi dan misi jangka panjang, serta langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Rencana ini dapat mencakup pemeliharaan budaya dan lingkungan, pengembangan infrastruktur, serta diversifikasi produk dan layanan.

Keempat keterlibatan masyarakat lokal, pengelolaan yang kompeten juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melibatkan komunitas lokal dapat memastikan bahwa kepentingan dan nilai-nilai mereka diakomodasi, sementara juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan desa wisata.

Kelima pengembangan sumberdaya alam dan budaya, aspek pengelolaan sumber daya alam dan budaya merupakan elemen penting dalam desa wisata. Pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian akan buktikan bahwa keindahan alam dan keaslian budaya dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang. Pengelolaan yang kompeten dan profesional menjadi pondasi penting untuk meraih keberhasilan desa wisata. Dengan memahami faktor-faktor ini, desa wisata dapat membangun

fondasi yang kokoh untuk menarik wisatawan, memberdayakan masyarakat lokal, dan melestarikan kekayaan budaya dan alamnya. Pernyataan yang ditekankan oleh (Widiastuti, 2020) memberikan penekanan pada partisipasi aktif masyarakat desa sebagai faktor kunci dalam keberhasilan desa wisata.

Partisipasi ini tidak hanya bersifat pasif sebagai penonton, tetapi melibatkan peran lebih aktif sebagai pelaku wisata, penyedia jasa, produsen produk wisata, bahkan pengelola desa wisata itu sendiri. Beberapa aspek yang dapat diperjelas dari pernyataan tersebut melibatkan, Pertama peran sebagai Pelaku Wisata, Masyarakat desa diharapkan untuk tidak hanya menjadi objek atau penonton dalam industri pariwisata, melainkan aktif sebagai pelaku wisata. Hal ini mencakup kemampuan untuk memberikan pengalaman yang otentik kepada wisatawan, berbagi pengetahuan tentang budaya lokal, dan berinteraksi dengan pengunjung untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat.

Kedua, Penyedia Jasa dan Produk Wisata, masyarakat desa dapat berperan sebagai penyedia jasa dan produk wisata. Ini bisa melibatkan penyediaan akomodasi, pemandu lokal, layanan kuliner tradisional, serta produk kerajinan tangan atau hasil produksi lokal lainnya. Dengan menjadi aktor utama dalam penyediaan berbagai layanan ini, masyarakat desa dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari industri pariwisata.

Ketiga, Pengelola Desa Wisata. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat desa juga dapat melibatkan mereka dalam pengelolaan desa wisata itu

sendiri. masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata, merancang program kegiatan, serta menjaga keberlanjutan dan pelestarian aspek budaya dan alam di sekitarnya.

Keempat Pendidikan dan Penyuluhan, masyarakat desa juga dapat berperan sebagai agen pendidikan dan penyuluhan bagi wisatawan. Mereka dapat memberikan informasi tentang tradisi lokal, sejarah, serta praktik-praktik keberlanjutan yang harus dihormati oleh pengunjung. Pendidikan ini membantu menciptakan kesadaran wisatawan terhadap keunikan dan keberlanjutan desa wisata. Dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif, desa wisata dapat mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. Partisipasi ini juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pengembangan desa wisata, menjadikan mereka mitra penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan inisiatif pariwisata lokal.

Selanjutnya Pernyataan yang disampaikan oleh (Meliani, 2021) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan desa wisata. Beberapa aspek yang mungkin dapat diidentifikasi dari pernyataan pentingnya Promosi dan perkembangan teknologi, khususnya media sosial, memberikan platform yang luas untuk promosi desa wisata.

Melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya, desa wisata dapat dengan mudah mempromosikan daya tariknya, kegiatan- kegiatan unik, dan pengalaman wisata yang dapat ditawarkan

kepada calon pengunjung. Penggunaan gambar, video, dan ulasan wisatawan dapat menjadi daya tarik yang kuat. Selanjutnya Interaksi dan Keterlibatan Wisatawan, Media sosial juga memungkinkan desa wisata untuk berinteraksi secara langsung dengan wisatawan. Mereka dapat memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan merespons umpan balik wisatawan. Keterlibatan langsung ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara desa dan pengunjung, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Pendekatan Digital dalam Pengelolaan penting dalam teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan desa wisata. Penggunaan aplikasi atau perangkat lunak manajemen wisata dapat membantu dalam pemantauan kunjungan, manajemen inventaris, serta analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Model pengembangan layanan digital, bahwa desa wisata dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan layanan digital seperti pemesanan online, panduan wisata digital, atau aplikasi mobile yang dapat membantu wisatawan menjelajahi desa dengan lebih baik. Ini dapat menciptakan kemudahan akses dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, desa wisata dapat mencapai visibilitas yang lebih besar, meningkatkan interaksi dengan pengunjung, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan. faktor ini menjadi krusial dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan desa wisata di era digital saat ini.

Dalam konteks ini, Desa Wisata Pancoh adalah sebuah desa wisata yang berlokasi di Padukuhan Pancoh, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini menerapkan konsep ekowisata, yang berfokus pada pelestarian budaya, tradisi, alam, dan kehidupan masyarakat lokal di Padukuhan Pancoh. Keberhasilan Desa Wisata Pancoh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat desa, dukungan dari pemerintah, dan pemanfaatan teknologi.

Pemerintah kalurahan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancoh sesuai dengan konsep Desa Wisata. Tugas pemerintah kalurahan mencakup membuat regulasi yang mendukung, memberikan dukungan pendanaan untuk infrastruktur, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dan mendorong partisipasi aktif warga desa dalam pengelolaan ekowisata. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat memfasilitasi penggunaan teknologi, khususnya media sosial, untuk mempromosikan Desa Wisata Pancoh kepada khalayak yang lebih luas. Melalui peran komprehensif ini, pemerintah kalurahan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekowisata, menjaga budaya dan alam, serta memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat setempat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintegrasikan data di lokasi penelitian secara obyektif. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek yang terkait dengan pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancoh, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat mengungkapkan sebab dan proses yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian (Margareta, 2013). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan Ekowisata di Padukuhan Pancoh telah berjalan, apa ialah yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan tersebut.

2. Objek Penelitian

a) Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini mencakup tiga aspek utama yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator dalam pengelolaan ekowisata. Dalam hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh,
2. Peran pemerintah kalurahan sebagai regulator dalam pengelolaan ekowisata. Dalam hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana peran pemerintah kalurahan sebagai regulator untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh,
3. Peran pemerintah kalurahan sebagai mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata. Dalam hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana peran pemerintah kalurahan sebagai mitra kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Ekowisata Pancoh.

b) Subjek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan metode Sampling Purposive dimana teknik sampling dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun subjek dari penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Krisna Cahyana	Carik Kalurahan Girikerto
2.	Samirin	Kaur Pangripta
3.	Suwarno	Ketua BPKal Girikerto
4.	Rudi Pramoko	Ketua BUMDesa
5.	Yunita	Bendahara BUMDesa
6.	Ngatijan	Koordinator unit wisata pancoh
7.	Purwadi	Dukuh
8.	Supriadi	Tokoh Agama
9.	Menuk	Tokoh Perempuan
10.	Noto	Pengelola Ekowisata Pancoh

(Sumber: data olahan 2024)

Secara umum, 10 Narasumber tersebut dipilih karena dianggap memiliki kompetensi dan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Narasumber-narasumber tersebut dipilih berdasarkan posisi dan peran mereka dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh.

3. Lokasi Penelitian

Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Lokasi ini dipilih berdasarkan landasan isu yang peneliti temukan pada saat kegiatan Praktikum, dan dilanjutkan dengan validasi terkait isu dan informasi yang disampaikan, proses validasi dilakukan dengan wawancara.

I. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti peroleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari data yang dikutip dari buku-buku, catatan arsip, dokumen- dokumen bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian. (Andi, 2006) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan dan menghasilkan data, antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data serta informasi dari terwawancara. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, atau topik tertentu. (Sari sasi gendro 2022).

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui dialog lisan dan pertemuan langsung dengan narasumber yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data tambahan yang mendukung hasil observasi. Dengan panduan wawancara yang telah disusun sesuai dengan lingkup penelitian.

Wawancara dilakukan dengan 10 informan yang berkaitan dengan subjek penelitian dan memiliki kapasitas dan pengetahuan yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitiannya, peneliti mewawancarai Carik Kalurahan, Ketua BPKal dan Koordinator unit Ekowisata Pancoh pada tanggal 10-11 Juli 2024, sementara Ketua BUMDesa, Pang Cipta, Bendahara BUMDesa, Dukuh Pancoh, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan pengelola ekowisata dilakukan pada tanggal 15-19 Juli 2024. Bertempat di kantor Kalurahan, kantor BUMDesa, kantor pokdarwis dan rumah warga.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai jenis dokumen, seperti buku, artikel, laporan, catatan, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Tujuan utama dari studi dokumen adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu atau fenomena yang sedang diteliti, atau untuk mengumpulkan data historis yang mendukung analisis atau penelitian yang sedang berlangsung. (Sari sasi gendro, 2022).

Pada metode studi dokumen peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait pengelolaan ekowisata yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Girikerto, seperti laporan proyek pembangunan, catatan pertemuan, dan dokumen kebijakan.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan juga studi dokumen kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sarisasi gendro,2022) Berikut ini adalah langkah-langkah yang membentuk rencana analisis data:

1. Pengumpulan Data

Dalam catatan lapangan, yang memiliki dua komponen, yaitu deskripsi dan refleksi, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancuh oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto. Pengalaman dan pengamatan pribadi peneliti juga disertakan dalam deskripsi.

2. Reduksi Data

Metode penelitian yang dikenal sebagai “reduksi data” berfokus pada ringkasan, abstraksi, dan informasi yang telah dikumpulkan dari catatan-catatan lapangan yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Data laporan ini disajikan dengan cara yang memudahkan pembaca dalam memahami, baik secara keseluruhan maupun bagian. Potongan-potongan ini ditulis dengan cara yang jelas dan mudah dibaca.

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Menurut Sekaran dan Bougie dalam Sugiyanto (2021:33) penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis akhir dari analisis kualitatif. Hal tersebut paling penting dalam menganalisis data karena merupakan tahap peneliti menjawab pertanyaan penelitian untuk menentukan apa yang diwakili oleh tema yang diidentifikasi, dengan mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti atau dengan membuat kontras dan perbandingan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK KALURAHAN GIRIKERTO

A. Sejarah Kalurahan Girikerto

Girikerto Kalurahan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Girikerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yakni: Kalurahan Tanggung, Kalurahan Ngandong, Kalurahan Nangsri Lor, dan Kalurahan Kemirikebo.

Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kalurahan, maka kalurahan-kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Girikerto. Girikerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan. Pada berjalannya pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang sampai dengan saat ini, kiprah yang diberikan sangatlah bagus karena membawa dari zaman ke zamannya dengan gaya dan tata cara memimpin yang berbeda.

Sejak tahun 1948 ini Pemerintah Kalurahan Girikerto dipimpin diantaranya sebagai berikut:

1. M. Ng Radiyo Hadisugondo pada tahun 1948-1986;
2. Ibnu Pratiknyo pada tahun 1989-1998;
3. Soeharto, BA pada tahun 1999-2013;
4. H. Sumaryanta, S. H. pada tahun 2013-2019; dan
5. H. Sudibya, S. Pd pada tahun 2020-sekarang.

Pemerintah Kalurahan berubah menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang serba modern dengan pengembangan teknologi. Selain itu, pemerintahan Kalurahan Girikerto juga mengalami perubahan dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat dan tertib. Wilayah Kalurahan Girikerto terbagi dalam 13 Padukuhan meliputi Padukuhan Ngandong, Nganggring, Kloposawit, Kemirikebo, Sukorejo, Bangun Mulyo, Babadan, Nangsri, Pancoh, Glagahombo, Daleman, Surodadi dan Karanggawang.

B. Geografis

Kalurahan Girikerto merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Kalurahan Girikerto terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Sleman, yang merupakan daerah pertanian, perkebunan, tegalan/ladang dan hutan. Selain itu, Kalurahan Girikerto berlokasi tidak jauh dengan pusat pemerintahan yaitu berjarak 11 kilometer dari ibukota Kabupaten Sleman, dan 22 kilometer dari ibukota Provinsi DIY. Adapun batas wilayah administratif Kalurahan Girikerto adalah sebagai berikut: batas wilayah administratif Kalurahan Girikerto adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Merapi (TNGM); Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Purwobinangun, Pakem; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Donokerto; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Wonokerto. Jika dilihat dari kondisi geografis, letak Kalurahan Girikerto tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten maupun

Provinsi, dan ditambah lagi dengan akses jalan yang baik. Menurut peneliti, dengan jarak yang tidak begitu jauh dari pusat kota, maka Kalurahan Girikerto sangat mudah dikunjungi oleh wisatawan. Sebab, Kalurahan Girikerto mampu menawarkan pesona alam yang indah yang dilatarbelakangi oleh pemandangan gunung merapi. Peneliti menyimpulkan bahwa selain karena dekat dengan gunung merapi, Kalurahan Girikerto sangatlah kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dapat dilihat dari lahan pertanian dan perkebunannya yang sangat subur, hutannya yang rimbun, air yang berlimpah.

C. Demografis

Secara umum, Kalurahan Girikerto memiliki total jumlah penduduk sebanyak 6.411 jiwa, yang berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 3.176 jiwa dan perempuan sebanyak 3.235 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, menunjukkan bahwa populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kalurahan Girikerto berdasarkan beberapa kriteria:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah

Data berikut menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan populasi di berbagai padukuhan. Tabel ini menunjukkan distribusi penduduk secara umum di setiap padukuhan. Ini dapat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan pembangunan infrastruktur. Perhatikan bahwa angka-angka ini adalah terbaru dan mungkin berubah seiring waktu.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Padukuhan

No.	Nama Padukuhan	RT	KK	Laki-Laki	Perempuan	Total Jiwa
1.	Babadan	6	225	361	364	725
2.	Bangun Mulyo	4	150	313	220	433
3.	Dalamen	4	120	205	180	385
4.	Glagahombo	4	88	153	157	310
5.	Karanggawang	5	124	174	213	387
6.	Kemirikebo	4	92	147	140	287
7.	Kloposawit	4	154	244	244	488
8.	Nangsri	5	133	215	231	446
9.	Ngandong	11	210	435	422	857
10.	Nganggring	6	275	409	431	840
11.	Pancoh	4	162	239	243	482
12.	Sukorejo	4	153	246	233	479
13.	Surodadi	5	88	135	157	292
Total Jumlah		66	1974	3176	3235	6411

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Girikerto memiliki 13 Padukuhan, 66 RT dan sebanyak 1.974 KK. Data di atas juga menunjukkan bahwa Padukuhan Ngandong memiliki jumlah RT paling banyak, yaitu 11 RT dan sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak (857 Jiwa). Akan tetapi, secara jumlah penduduk juga tidak terlalu jauh dari Padukuhan Nganggring yang hanya memiliki 6 RT dengan jumlah

840 jiwa. Sedangkan Padukuhan yang paling sedikit penduduknya yaitu Padukuhan Kemirikebo dengan jumlah 287 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel berikut menunjukkan mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Gambaran umum tentang distribusi tingkat pendidikan dalam populasi ini berguna untuk analisis sumber daya manusia dan perencanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari tidak sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	520	572	1092
2.	Tamat SD/sederajat	610	635	1245
3.	Tidak tamat SD/sederajat	348	309	657
4.	SLTP/sederajat	492	483	975
5.	SLTA/sederajat	1005	995	2000
6.	Diploma I/II	26	30	56
7.	Akademi/Diploma III/S Muda	63	54	117
8.	Diploma IV/Strata I	105	151	256
9.	Strata II	5	3	8
10.	Strata III	0	0	0
Jumlah Total		3176	3235	6411

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Dari data di atas, Pihak kalurahan ada kesalahan dalam penjumlahan dan tabel diatas bukan berjumlah 6.411 melainkan dari hasil yang saya hitung

berjumlah 6.406, namun data diatas menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan lebih banyak Masyarakat Kalurahan Girikerto yang lulus SLTA/sederajat dengan jumlah 2.000 jiwa. Tetapi, dari angka tersebut tampaknya tidak banyak juga yang kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memperoleh gelar Diploma dan Sarjana dengan total hanya 437 jiwa. Sedangkan sebanyak 3.974 jiwa penduduk hanya memperoleh pendidikan SLTP/sederajat ke bawah.

Lebih lanjut, penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak tamat SD dan hanya tamat SD juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan total jumlah sebanyak 2.994 jiwa.

Selain itu, bahkan belum ada penduduk Girikerto yang mampu mencapai pendidikan Strata III, sedangkan yang memperoleh strata II hanya terdapat 8 jiwa dan Strata I sebanyak 256 jiwa. Artinya, secara tingkat pendidikan Kalurahan Girikerto ini mengalami ketimpangan yang sangat tinggi, dimana mayoritas masyarakat Girikerto bahkan tidak lulus SLTA/ sederajat dan juga minimnya warga masyarakat yang mengakses perguruan tinggi.

Menurut peneliti, hal ini sangat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalurahan Girikerto secara umum. Sebab, pendidikan dan keterampilan merupakan syarat utama bagi masyarakat dalam mengembangkan segala potensi yang ada.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel berikut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di wilayah kalurahan. Ini memberikan gambaran umum tentang struktur ekonomi dan distribusi tenaga kerja di masyarakat, dan dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan ekonomi, pengembangan SDM, dan analisis pasar tenaga kerja.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani/perkebunan	2170
2.	Pelajar/mahasiswa	1250
3.	Belum/tidak bekerja	988
4.	Karyawan swasta	735
5.	Mengurus rumah tangga	423
6.	Wiraswasta	314
7.	Buruh harian lepas	109
8.	Pensiunan	81
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65
10.	Guru/Dosen	65
11.	Buruh tani/perkebunan/peternakan	35
12.	Perangkat Desa	25
13.	Kepala Desa	1
14.	Pedagang	53
15.	Kepolisian RI (Polri)	19
16.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	14

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
17.	Sopir	15
18.	Tukang kayu	11
19.	Perawat	7
20.	Pembantu rumah tangga	6
21.	Peternak	4
22.	Wartawan	1
23.	Lain-lain	20
Total		6411

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Girikerto berprofesi sebagai petani/perkebunan dengan jumlah sebanyak 2.170 jiwa.

Namun angka ini lebih kecil dari masyarakat yang belum berpenghasilan seperti pelajar/mahasiswa sebanyak 1.250 jiwa dan yang belum/tidak bekerja sebanyak 988 jiwa; dimana jika jumlah dari keduanya digabungkan mencapai 2.238 jiwa, lebih tinggi dari jumlah petani itu sendiri.

Menurut peneliti, banyaknya masyarakat Girikerto yang berprofesi sebagai petani tersebut tentu saja tidak terlepas dari kondisi geografis Kalurahan Girikerto dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Data berikut menunjukkan pembagian populasi berdasarkan agama. Informasi ini menunjukkan keragaman keyakinan dalam populasi dan dapat membantu dalam membuat kebijakan dan layanan publik yang inklusif.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah orang yang menganut agama tertentu dan persentasenya terhadap populasi keseluruhan.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah jiwa
1.	Islam	5851
2.	Kristen Protestan	20
3.	Katholik	532
4.	Hindu	3
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
7.	Kepercayaan terhadap Tuhan YME/lainnya	5
Total		6411

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Mayoritas penduduk Kalurahan Girikerto memeluk agama Islam dengan jumlah 5.851 jiwa, kemudian disusul oleh agama Katolik 532 jiwa. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Girikerto hanya terdapat 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Hindu serta aliran kepercayaan lainnya. Sedangkan untuk agama Budha dan Konghucu tidak memiliki pemeluknya. Lebih lanjut, peneliti menyimpulkan bahwa sekalipun agama Islam merupakan yang terbesar, tetapi dengan adanya agama dan aliran kepercayaan lainnya telah menunjukkan bahwa masyarakat Girikerto memiliki keberagaman.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel berikut menunjukkan data distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Informasi ini sangat penting untuk memahami struktur demografis populasi dan dapat digunakan dalam perencanaan program dan kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan layanan sosial. Selain itu, data ini membantu menganalisis tren pertumbuhan penduduk dan memproyeksikan kebutuhan masyarakat di depan.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0 s/d 1 tahun	13
2.	2 s/d 14 tahun	730
3.	15 s/d 19 tahun	550
4.	20 s/d 29 tahun	1153
5.	30 s/d 39 tahun	902
6.	40 s/d 49 tahun	1088
7.	50 s/d 59 tahun	779
8.	60 s/d 69 tahun	619
9.	70 tahun ke atas	577
Total		6411

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi masyarakat Girikerto lebih banyak yang berusia 20 hingga 29 tahun dengan jumlah sebanyak 1.153 jiwa. Menurut peneliti, kelompok umur yang demikian merupakan usia yang sangat produktif dalam dunia kerja di berbagai sektor jika dibandingkan

dengan usia yang lainnya. Tetapi usia kerja di Indonesia secara umum rata-rata berusia 17 s/d 60 tahun.

Berdasarkan data di atas, maka skenario usia kerja di Kalurahan Girikerto dapat pula dipatok mulai dari usia 20 s/d 59 tahun. Jika dihitung dari kelompok usia 20 s/d 59 tahun, maka Kalurahan Girikerto memiliki jumlah usia kerja sebanyak 3.922 jiwa. Menurut peneliti, hal ini telah menunjukkan bahwa Kalurahan Girikerto sejatinya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun yang menjadi tantangannya adalah ialah pendidikan dan keterampilan masyarakatnya yang mesti ditingkatkan secara terus-menerus. Disisi lain, Kalurahan Girikerto juga memiliki populasi masyarakat lanjut usia yang cukup banyak, yaitu kelompok usia 60 tahun ke atas yang berjumlah 1.196 jiwa. Tentu saja ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Kalurahan agar hak-haknya sebagai warga masyarakat setempat tidak terabaikan.

D. Potensi Kalurahan

Berdasarkan dengan kondisi kewilayahan yang berada di Kalurahan Girikerto ini dari aspek topografi, demografi maupun dengan geografnisnya memang terletak di dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Merapi, yang merupakan batas dari Kabupaten Sleman dari sisi sebelah utara. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena merupakan kawasan yang sangat subur. Sehingga Kalurahan Girikerto menjadi area lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pertanian, perkebunan dan peternakan pada gilirannya Kalurahan Girikerto ditetapkan sebagai kawasan strategi agropolitan.

Lebih lanjut, masyarakat Girikerto juga mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan berbagai inovasi agar dapat menunjang kehidupan dalam mencapai kesejahteraan. Misalnya, masyarakat membuat area-area di dusun dengan menciptakan wisata Kalurahan atau penunjang lainnya. Hal ini sangatlah bagus demi tercapainya *Sleman the Living Culture*, dimana Kalurahan Girikerto juga menjadi tujuan wisatawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berkunjung dan disuguhi dengan beberapa atraksi serta pameran wisata kalurahan. Hal itu tidak lepas dengan peningkatan sumber daya manusia yang mampu berkembang dalam berkompetisi demi tercapainya kemajuan suatu wilayah.

Kemudian, jika dilihat dari tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Kalurahan Girikerto, mayoritas adalah sekolah menengah atas sederajat.

Memang ini menjadikan pekerjaan bagi pemerintah terkait agar mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi. Namun demikian masyarakat Girikerto mampu melahirkan gagasan, ide, inovasi dan kreatifitas yang sangat banyak, seperti pembuatan pasar tradisional Tegal Lovegood, wisata Kalurahan, Desa Ekowisata Pancoh, arena downhill, pemanfaatan teknologi tepat guna yang diprakarsai oleh Gapoktan Girikerto, pemanfaatan lahan untuk pengembangan teknik budidaya tanaman, peningkatan kualitas olahraga dengan mencetak para atlet, tingkat pengangguran yang semakin berkurang, keikutsertaan dalam beberapa komunitas/organisasi dan banyak lainnya.

Memberikan fasilitas umum kepada masyarakat merupakan cara bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan dalam melakukan beberapa terobosan kegiatan untuk mencapai kemajuan dalam bidang pembangunan secara merata.

Kalurahan Girikerto sampai dengan saat ini terlihat untuk sumber daya pembangunan yang dimiliki berupa fasilitas publik memang belum bisa dikatakan merata dan ada, namun dengan pemanfaatan yang telah dibangun dengan bantuan ataupun swadaya memberikan pengaruh dalam berkegiatan. Kalau melihat data ini ditemui beberapa bangunan yang ini minim diantaranya gedung serbaguna, bangunan pendidikan, MCK umum/individual, embung, saluran irigasi, kondisi jalan Kalurahan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Pemerintah Kalurahan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini pemerintah kalurahan terus menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah lainnya atau swasta guna meningkatkan pembangunan sarana prasarana penunjang masyarakat yang belum ada di beberapa titik strategis.

Selain itu, jika dilihat dari aspek sosial budaya masyarakat yang ada memang jauh dari pusat perkotaan, namun ini ada dampak positif juga terhadap nilai-nilai kebudayaan yang saat ini ini dijunjung tinggi. Potensi sosial budaya yang dimiliki masyarakat Girikerto sangatlah kaya, mulai dari gotong royong warga hingga pada beragam kesenian tradisional. Ini karena memang kegiatan dan program yang dilaksanakan atas dasar nilai-nilai kebudayaan yang ini dijunjung tinggi.

Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan atau akreditasi dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Kalurahan Girikerto sebagai

kalurahan budaya dan kalurahan mandiri. Upaya dalam menciptakan sosial masyarakat yang diiringi dengan kebudayaan sangat melekat di keseharian masyarakat Girikerto, seperti adab dan perilaku baik yang terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kalurahan Girikerto juga memiliki beberapa kelompok seni yang sudah terakui oleh dinas terkait dalam melaksanakan pelestarian kesenian tradisional. Ini semua tidak terlepas dari inovasi warga masyarakat dalam memberikan warna yang berbeda agar menjadikan ciri khas tidak menyimpang dari kaidah keistimewaan Yogyakarta.

E. Pemerintahan dan Lembaga

Kalurahan Girikerto merupakan salah satu kalurahan di wilayah Indonesia yang memiliki struktur pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan di tingkat kalurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh perangkat kalurahan dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat dan pembangunan. Adapun sumber profil kalurahan, peneliti dapat dari Profil Kalurahan Girikerto yang ada di website <https://girikertosid.slemankab.go.id/first/artikel/22> resmi Kalurahan Girikerto.

1. Pemerintah Desa

Visi Kalurahan Girikerto yaitu:

“Sejahtera, Mandiri, Religius dan Berbudaya Dalam Lingkungan Yang Lestari”.

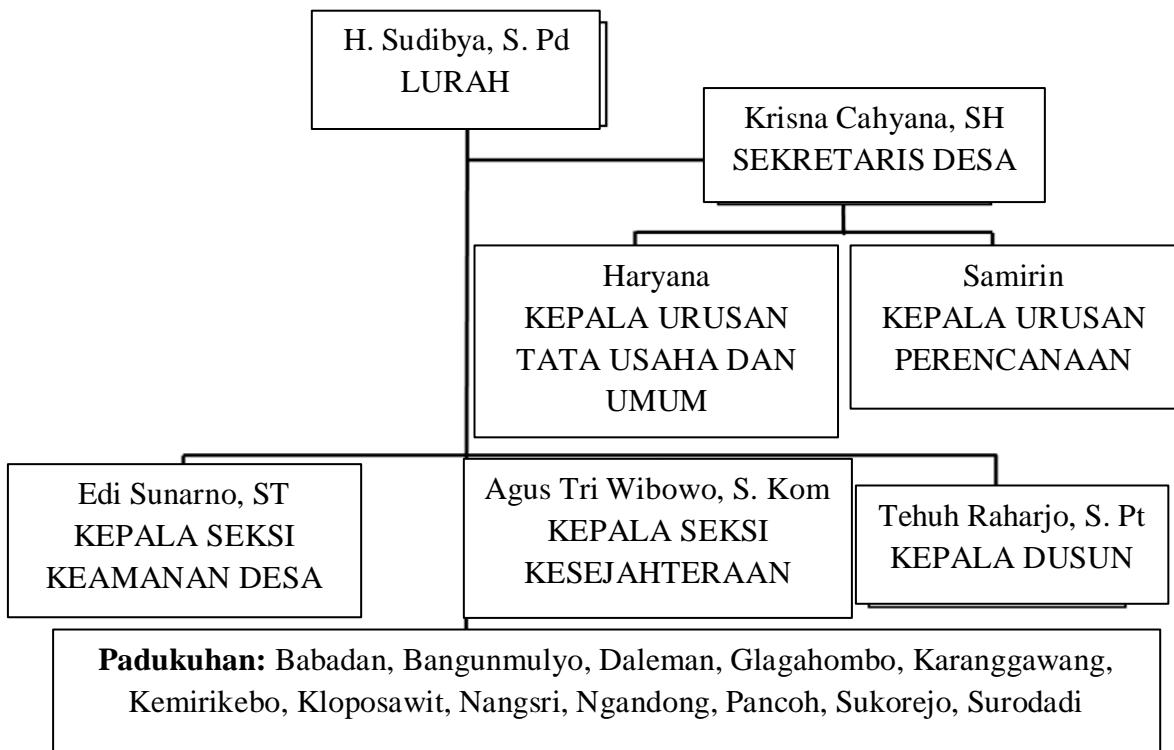
Misi Kalurahan Girikerto adalah:

- a) Bidang Pemerintahan
 - 1) Meningkatkan penataan administrasi Kalurahan.

- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan momong masyarakat.
 - 3) Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal.
 - 4) Mewujudkan masyarakat Girikerto yang aman dan kondusif.
- b) Bidang Pembangunan
- 1) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui: Bidang pertanian, Bidang peternakan, Bidang perikanan dan Bidang wisata.
 - 2) Menggerakan dan meningkatkan BUMDesa.
 - 3) Menerapkan pembangunan dengan mengutamakan skala prioritas.
 - 4) Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam.
- c) Bidang Kemasyarakatan
- 1) Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat Girikerto yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama.
 - 2) Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama.

- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas Jaminan kesehatan masyarakat dengan menjalankan program-program bantuan kesehatan secara maksimal, serta menyediakan fasilitas medis atau pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas kepemudaan melalui wadah karang taruna untuk mengembangkan potensi, inovatif dan kreatif generasi muda dalam bidang apapun.
- 6) Menjaga dan melestarikan budaya Melaksanakan kegiatan kebudayaan dan menjaganya serta melestarikan adat istiadat.

Bagan 2.1. Struktur Pemerintah Kalurahan Girikerto



(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Tabel 2. 6 Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Suwarna
2.	Wakil ketua	Agus setyawan
3.	Sekretaris	Arum Fatwa, S. Pd
4.	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Rian Pujianto
5.	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Ari budiharso S.
6.	Anggota 1	Marimin
7.	Anggota 2	Roma Riyanto

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Struktur ini sebagai kunci dari penyangga demokrasi kalurahan, dimana BPKal sebagai penyerap aspirasi masyarakat kalurahan. Suwarna selaku ketua BPKal di amanahkan secara demokrasi kalurahan sebagai ketua.

2. Badan Usaha Milik Desa

Tabel 2. 7 Pengurus BUMDesa Girikerto

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Pramoko, S. Pd	Direktur
2.	Yunita	Bendahara
3.	Kurnia Azizah	Sekretaris
4.	Ngatijan	Koordinator Unit Usaha Ekowisata Pancoh
5.	Andri	Koordinator Unit Usaha Kampoeng Wisata Daleman Asri
6.	Wagimin	Koordinator Unit Usaha Bumi Perkemahan Lembah merapi
7.	Drs. Martono T. Pamuji	Koordinator Unit Usaha Listrik

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Dari data di atas, menunjukkan bahwa Kalurahan Girikerto memiliki empat unit BUMDesa, yakni Desa Wisata Pancoh, Kampoeng Wisata Daleman Asri, Bumi Perkemahan Lembah Merapi dan unit usaha Listrik.

Menurut peneliti, walaupun semua kegiatan diatur oleh POKDARWIS, BUMDesa tetap merupakan mitra dari POKDARWIS seperti yang disebutkan dalam aturan Kalurahan pada PERMENDESA nomor 11 Tahun 2019. BUMDesa Girikerto juga sudah terlembagakan dengan baik, dimana secara

kepengurusannya sudah lengkap sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Namun yang menjadi tantangannya adalah bagaimana unit-unit usaha BUMDesa tersebut mampu memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Tabel 2. 8 Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Siswantara	Ketua 1
2.	Wagimin	Ketua 2
3.	Kalis Triyanto, S. Pus	Sekretaris 1
4.	Try Dady Widiyanto	Sekretaris 2
5.	Waliyo, S. Pd	Bendahara 1
6.	Sardi, S.Pd., MM	Bendahara 2
7.	Ir. Priyatmoko H. Supriyadi	Bidang Pembangunan Fisik
8.	Arkham Lukman A. Suharjono	Bidang Keagamaan
9.	Agung Tri Suryantoro	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
10.	Sunarto Suranto	Bidang Ekonomi
11.	Suharyanto Murwato	Bidang Budaya
12.	Ari Widiantoro	Bidang Pemuda dan Olahraga

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), maka sangat membantu

Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam menyukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kalurahan setempat.

Sebab, dalam kepengurusan LPMK juga telah dilengkapi penanggung jawab di setiap bidang kegiatan. Dimana bidang-bidang tersebut di atas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 2. 9. Pengurus TP-PKK

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Sudibya, S. Pd	Pelindung (Lurah Girikerto)
2.	Teguh Raharjo, S. Pt	Pembina (Kamitua)
3.	Hj. Winarti, A.Md., Keb	Ketua Umum
4.	Isnaini O. Azizah, A.Md., Keb	Wakil Ketua Umum
5.	Emi Rahayu	Sekretaris 1
6.	Erna Suryanti	Sekretaris 2
7.	Mardiyati	Bendahara 1
8.	Fiti Rahayu	Bendahara 2
POKJA I: Bidang Pembinaan Karakter Keluarga		
1.	Ketua Pokja	Lilis Kusuma Dewi
2.	Sekretaris	Eni Lestari
3.	Anggota	Prapti wahyuni, Rubiyatun, Tri hartini, Supriyati, Winarti, Daris Salamah, Sulistriyani.
POKJA II: Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga		

No.	Nama		Jabatan
1.	Ketua Pokja	Asih Marwati	
2.	Sekretaris	Anuk Miarsa	
3.	Anggota	Tukiyah, Aniati Rusmani, Lestariati, Ambar Widiyati, Maryanti, Dwi Lestari, Andarsih, Masiyem.	
POKJA III: Penguatan Ketahanan Keluarga			
1.	Ketua Pokja	Widya Purwaningsih	
2.	Sekretaris	Rumiyanti	
3.	Anggota	Endang S. Murni, Honorias S. Widanarti, Saritri, Bangun Sutarmi, Nuning Sulistyorini, Sartini, Sugiyarti, Imroh Suharti.	
POKJA IV: Kesehatan Keluarga dan Lingkungan			
1.	Ketua Pokja	Kusharyanti	
2.	Sekretaris	Nurhayati	
3.	Anggota	Fitri Rohani, Devanti M. Baharini, Farida A. Astuti, Sri Murwani, Sri Purwangsih, Yunarti, Yunita Pancastri, Markistun.	

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat lihat bahwa tim penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) telah terbagi dalam empat Kelompok Kerja (Pokja) yakni Pokja Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Penguatan Ketahanan Keluarga, Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. Dari data di atas, menunjukkan bahwa banyak masyarakat Girikerto terutama kaum perempuan yang turut andil dalam program ini. Artinya, dengan banyaknya tim penggerak PKK tersebut,

maka PKK kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Girikerto, melalui berbagai program dan kegiatannya guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab, dengan adanya organisasi ini, masyarakat juga dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas setiap ialah yang dihadapi.

5. Karang Taruna

Tabel 2. 10 Pengurus Karang Taruna Kalurahan Girikerto

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Umum	Muiz Yurohmad
2.	Ketua 1	Rudi Pramoko
3.	Ketua 2	Ruwid Mulyadi
4.	Sekretaris	Rizky Indayana
5.	Bendahara 1	Annisa D. Nirmalasari
6.	Bendahara 2	Rifky Nur Latifah
Seksi Usaha Ekonomi Produktif		
1.	Kepala Seksi	Ridha Hermawan
2.	Anggota	Dani Kurniawan, Dwi Yulianto, Iksan Nugroho, Teguh Pramono.
Seksi Rekreasi, Olahraga dan Kesenian		
1.	Kepala Seksi	Sidik Nurhadi
2.	Anggota	Septi Harwati, Bima Laksono, Martono, Sita Vitasari, Intan Nur Aini
Seksi Kesehatan Sosial		
1.	Kepala Seksi	Dwi Sutrisno
2.	Anggota	Susi Sabarni, fajar Fauzi

No.	Jabatan		Nama
Seksi Hu Kemitraan dan Media			
1.	Kepala Seksi	Hendri Nur Arbiyanto	
2.	Anggota	Eka Kurniawan, Rafli, Nasrudin, Dwi Rahmadi	
Seksi Pendidikan dan Pelatihan			
1.	Kepala Seksi	Risti Dwi Prastiwi	
2.	Anggota	Reza Nur Sahid, Tusiran, Shole Udin	
Seksi Lingkungan Hidup dan Pariwisata			
1.	Kepala Seksi	Rachmad Bayu Aji	
2.	Anggota	Diva O. Damayanti, Fajrin Ruminingsih, Khusnulawistiana, Anisa Fahrumi	
Seksi Kerohanian dan Bina Mental			
1.	Kepala Seksi	Fajar Yuliani	
2.	Anggota	Dwi Aziz Saputra, Sri Handayani, Dani Prasetyo	

(Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023)

Dari daftar kepengurusan Karang Taruna di atas, dapat dilihat bahwa begitu banyak pemuda/pemudi yang terlibat di dalamnya. Artinya, melalui organisasi ini kaum muda juga dapat berkarya dan berkontribusi untuk Desa setempat. Menurut peneliti, karena di dalam Karang Taruna kebanyakan adalah pemuda/ pemudi, maka mereka dapat mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan kemajuan Desa.

6. AD/ART Desa Ekowisata Pancoh

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ekowisata Pancoh merupakan dokumen yang menjelaskan filosofi, struktur, dan mekanisme pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, yang secara mendalam menegaskan posisi strategis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan dukungan penuh pemerintah kalurahan.

Dalam filosofi, ekowisata Pancoh dibangun atas kesadaran mendalam akan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang memerlukan pengembangan sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah kalurahan tidak sekadar menjadi institusi administratif, melainkan mitra strategis dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program ekowisata.

Struktur kelembagaan ekowisata dirancang secara terbuka dan partisipatif, dengan mekanisme koordinasi yang memungkinkan keterlibatan langsung pemerintah kalurahan dalam setiap pengambilan keputusan penting. Hal ini tercermin dalam mekanisme pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap kelompok ekowisata, mulai dari aspek pelatihan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, hingga promosi dan pemasaran destinasi.

Ekowisata Pancoh ini didirikan dan Berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah Bersama yang tumbuh dan berkembang dimulai dari ketertarikan suatu Lembaga untuk mengembangkan potensi alam yang ada. Anggota AD/ART meliputi seluruh masyarakat pancoh tanpa terkecuali.

Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam AD/ART Desa Ekowisata Pancoh dan mempertanggung jawabkan hasil kegiatan pada anggota melalui rapat yang dilaksanakan dalam waktu 1 bulan sekali.

Tabel 2. 11 Pengurus AD/ART Desa Ekowisata Pancoh

Penasehat	Ngatijan
Ketua	Ruwit Mulyadi
Wakil Ketua	Suharyanti
Sekretaris	Krisna Cahyana Windi Gita Cahyani
Bendahara	Yunita Rachmawati Fitri Astuti

(Sumber: AD/ART Ekowisata Pancoh)

Struktur kepengurusan Ekowisata Pancoh, diketuai oleh Ruwit Mulyadi dalam menjalankan kerja Ekowisata Pancoh. Selain itu, dalam hal, kemitraan dengan pemerintah Kalurahan Girikerto. Lebih menjelaskan dalam AD/ART Ekowisata Pancoh bahwa dalam pasal Pasal 5 Hubungan dengan Pemerintah Kalurahan:

1. Pemerintah kalurahan bertindak sebagai pembina dan pendamping
2. Kepala kalurahan atau wakilnya menjadi penasehat resmi
3. Setiap keputusan strategis wajib dikonsultasikan dengan pemerintah kalurahan.

Bahwa, tata kelola Ekowisata melibatkan Pemerintah Kalurahan Girikerto, dimana ketentuan dasar AD/ART menyebutkan bahwa Pemerintah kalurahan ikut andil dalam berjalanya Ekowisata Pancoh.

F. Ekowisata Pancoh

1. Sejarah

Pancoh merupakan salah satu Padukuhan di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010k, Proses pemulihan pasca bencana erupsi dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melihat adanya potensi alam menarik dari Dusun pancoh, Akhirnya pelan-pelan dilakukan investigasi untuk melihat lebih dalam lagi potensi alam Dusun Pancoh. Pada tanggal 14 februari 2014 Desa Pancoh resmi menjadi Desa Ekowisata.

2. Visi Misi

Visi:

“Terwujudnya Dusun Pancoh sebagai Desa Ekowisata yang bersih, nyaman, sehat, berbudaya dan menjadi media atau wadah pembelajaran di Desa melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan lingkungan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat”.

Misi:

- a) Meningkatkan SDM dan SDA yang tersedia
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun Desa wisata
- c) Membangun, mengembangkan dan merawat sarana dan prasarana untuk penataan lingkungan
- d) Melestarikan kebudayaan Desa
- e) Meningkatkan pengelola ekowisata yang bertanggung jawab

3. Potensi Wisata

Terdapat beberapa ikon wisata yang dikembangkan di Padukuhan Pancoh yaitu meliputi: Embung Pancoh, Joglo Pusung, Camping Ground. Sawah, Kandang Komunal, Lapangan Volly, Biogas, Susur Sungai, Kebun Salak, Batik Art, Caping Art, Bamboo Art, Bank Sampah, Gamelan Art, Omah Partorejan, Paket Tour Safari, dan berbagai cinderamata khas Pancoh.

Kemudian untuk menunjang berbagai kegiatan wisata di Padukuhan Pancoh, juga telah disediakan beberapa sarana dan fasilitas seperti:

- a) 3 Pendopo yang dilengkapi sound system, wifi, tikar, LCD dan kursi;
- b) Homestay dilengkapi dengan toilet difabel, lansia dan anak-anak;
- c) Reservasi homestay dan perlengkapan kantor;
- d) Perlengkapan outbond;
- e) Asuransi wisatawan dan pengelola;
- f) Genset;
- g) Masjid dan Mushola;
- h) Area parker motor, mobil dan bus;
- i) Omah Partoredjan.

4. Struktur Kepengurusan

Tabel 2. 12 Struktur Pengurus Desa Ekowisata Pancoh

No.	Jabatan	Nama
1.	Pelindung	Ngatijan
2.	Penasihat	Ruwit Mulyadi
3.	Wakil Ketua	Suharyanti
4.	Sekretaris	Windi Gita Cahyani, Krisna Cahyana
5.	Bendahara	Yunita Rachmawati, Fitri Astuti
6.	Anggota	Seluruh warga masyarakat Padukuhan Pancoh tanpa terkecuali

(Sumber: Profil Desa Ekowisata Pancoh Tahun 2023)

Jika dilihat dari penjabaran singkat mengenai Desa Ekowisata Pancoh di atas, menunjukkan bahwa wisata ini pada awalnya dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakat Padukuhan Pancoh itu sendiri, yang pada gilirannya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak teruk dari pemerintah Kalurahan setempat melalui BUMDesa. Menurut peneliti, salah satu yang menarik dari pengembangan wisata ini yaitu karena melibatkan semua masyarakat Padukuhan Pancoh sebagai anggota pengelolanya.

Lebih lanjut, peneliti memandang bahwa tingginya antusias masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi yang ada telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kalurahan setempat.

Fakta bahwa semakin banyaknya spot wisata yang telah dikembangkan di dalam Desa Ekowisata Pancoh tersebut, pada gilirannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dari

ulasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Ekowisata Pancoh mampu memperkenalkan kekayaan ekologi yang merupakan produk dari Padukuhan Pancoh dan sekitarnya; mampu menggerakkan perputaran roda perekonomian masyarakat khususnya di Padukuhan Pancoh dan sekitarnya; wisata ini juga bertujuan untuk menjaga, merawat dan mengembangkan SDA agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar; Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat; mampu menciptakan kebersamaan, kerukunan dan gotong royong; dan terbangunnya sikap dan budaya peduli terhadap lingkungan.

Dari data AD/ART Pemerintah Kalurahan Girikerto tidak dilibatkan dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah kalurahan kebijakan yang di buat tidak akan berjalan dengan baik. Melihat dari struktur diatas maka terlihat bahwa pemerintah kalurahan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk Ekowisata Pancoh, justru yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan di Padukuhan Pancoh hanya sekolompok masyarakat di Padukuhan Pancoh itu saja.

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan memperoleh data dari informan yang telah ditemui. Maka dalam hal ini peneliti akan menganalisis atau menguraikan hasil temuan-temuan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik itu data primer maupun data sekunder yang akan disajikan dalam bentuk narasi yang sederhana sehingga dapat disimpulkan bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Girikerto Dalam Pengelolaan Ekowisata Pancor dengan melalui beberapa data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui sejumlah narasumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan demikian dalam analisis data ini, peneliti akan menggunakan jawaban-jawaban dari para narasumber yang telah memberikan informasi dengan dasar analisis yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

A. Deskripsi Informasi

Penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengelolaan ekowisata Pancor. Informasi diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, teruk pejabat pemerintah kalurahan, pengelola ekowisata, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai lembaga terkait.

Informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek pengelolaan ekowisata, kebijakan dan regulasi, program pemberdayaan masyarakat,

pengembangan infrastruktur, promosi dan peran, serta kemitraan dengan berbagai pihak.

B. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai fasilitator dalam pengelolaan ekowisata Pancuh

Pemerintah kalurahan perlu melaksanakan peran yang optimal dalam pengembangan potensi ekowisatanya. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai Krisna Cahyana selaku Carik Girikerto, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Salah satu desa ekowisata di Girikerto menerapkan konsep ekowisata berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan alam. Ekowisata Pancuh resmi diresmikan sebagai desa ekowisata pada tanggal 14 Februari 2014. Oleh karena itu, pemerintahan kalurahan telah setuju untuk memprioritaskan pembangunan Ekowisata ini sejak awal berdirinya. Ekowisata Pancuh dikelola dengan baik oleh pemerintah Kalurahan Girikerto. Kami berusaha untuk mengelola dan mengembangkan ekowisata dengan baik untuk kepentingan masyarakat karena kami menyadari potensi besar desa ini. Untuk melakukan penyelidikan awal, kami bekerja sama dengan akademisi dan pakar pariwisata. Setelah itu, kami membuat rencana induk pengembangan ekowisata dengan melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, kami membentuk POKDARWIS ekowisata di Padukuhan Pancuh dengan anggota dari pemerintah kalurahan, masyarakat, dan tokoh lokal. Selain itu, kami meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pemanduan wisata, manajemen homestay, dan keterampilan kerajinan tangan. Selain itu, kami mendukung pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta menyediakan permodalan bagi bisnis yang mendukung kegiatan ekowisata.” (wawancara 10 juli 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Samirin selaku Kaur

Pangripta. Berikut hasil dari wawancara dengan beliau sebagai berikut;

“Sejauh ini, sudah ada investasi di sana, penyertaan modal, dan pelatihan bagi pengelola dan POKDARWIS yang ada di Ekowisata Pancuh. Sejauh ini belum ada kebijakan yang ditetapkan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang terjaga dan dikelola untuk mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan Pada umumnya, kebutuhan masyarakat akan diusulkan, seperti pembangunan jalan di sekitar

ekowisata. Jika pemerintah daerah tidak dapat melakukannya, maka akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau dinas pariwisata. Saya berharap Desa Wisata ini akan tetap ada dan membantu kehidupan di Kalurahan Girikerto. Selain itu, diharapkan mereka dapat berinovasi dan bekerja sama dengan Desa wisata lain. Untuk meningkatkan ekowisata ini, diperlukan kerja sama. Misalnya, dalam bidang pertanian (misalnya, umbi-umbian) diperlukan kerja sama dengan Kelompok Wanita Tani dan UMKM.” (Wawancara, 11 juli 2024)

Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan carik, peneliti juga melakukan wawancara kepada Suwarno selaku ketua BPKal Girikerto, yang akan dijelaskan sebagai berikut;

“Dalam hal ini, pemerintah padukuhan bertanggung jawab atas pengelolaan wisata pancoh dengan membangun semua akses penunjang wisata yang ada di padukuhan dan dengan menetapkan peraturan untuk memulai dengan badan usaha padukuhan untuk mengembangkan ekowisata. Selain itu, pemerintah padukuhan mendorong BUMDesa untuk mempertahankan konstitusi dengan padukuhan dan secara moral mendorong pengembangan ekowisata. Sebagian besar diharapkan untuk mempertahankan ekologi lingkungannya dengan melakukan konservasi alam, misalnya. Untuk membuat wisata lebih menarik dan tidak monoton, Anda tetap harus mengembangkan ide-ide baru.” (wawancara, 11 juli 2024)

Dalam wawancara lanjutan, peneliti mewawancarai Ketua BUMDesa Rudi Pramoko diuraikan sebagai berikut;

“Kami menerima pelatihan dari pemerintah Kalurahan, kami menerima bantuan infrastruktur dari pemerintah Kalurahan, dan kami juga menerima bantuan modal untuk mendorong pengembangan. Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah Kalurahan untuk mengelolanya, dan kami akan menerima informasi tentang rencana. Sangat penting bagi BUMDesa dan POKDARWIS untuk bekerja sama untuk menarik wisatawan ke ekowisata kami. Ekowisata harus tetap berpegang pada prinsip bahwa harus memperhatikan ekosistem. Pengelola yang menggunakan ekowisata tanpa menghilangkan prinsip ekowisata dapat menghemat banyak uang. Nilai-nilai budaya yang ada harus dipertahankan, tanpa menghilangkan ciri khas ekowisata.” (wawancara, 15 juli 2024)

Wawancara lanjutan, peneliti mewawancarai Ngatijan selaku Koordinator Unit Usaha Ekowisata Pancoh, dari wawancaranya akan diuraikan sebagai berikut;

“Pemerintah Kalurahan hanya melakukan pengawasan dan pemantauan di dalam Ekowisata Pancoh. Dan pada saat itu, Kalurahan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan ekowisata pernah memberikan pelatihan atau pembekalan kepada kami. Infrastruktur tambahan, perawatan jalan, dan akses dibangun oleh pemerintah Kalurahan. Itu adalah peran tanggung jawabnya. Untuk menjaga dan mempertahankan ekowisata, saya ingin generasi muda yang mengelolanya untuk merasa memiliki. Strateginya sedang diperbaiki, salah satunya adalah jalan menuju ekowisata. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengunjung akses ke dan dari Ekowisata Pancoh.” (wawancara, 15 juli 2024)

Wawancara selanjutnya dengan Yunita selaku Bendahara BUMDesa. Dalam wawancaranya, diuraikan sebagai berikut;

“Sejauh ini, pemerintah lebih baik dari sebelumnya, dengan memberikan stimulus anggaran untuk potensi aset wisata Padukuhan Pancoh dan memperbaiki infrastruktur. Kami didorong untuk terus berkembang karena mereka mungkin melihat kemajuan dari wisata pedesaan lainnya. Salah satu tanggung jawab pemerintah Kalurahan adalah menyediakan pelatihan bagi kami dan memberikan informasi tentang kontribusi Kalurahan kepada kami. Sejauh ini, pengelolaannya kompak dan bekerja sama dengan institusi lain. Pemeliharaan infrastruktur pemerintah juga penting; rencana masa depan akan bekerja sama dengan UMKM dan jajanan lokal. Kami menjual produk kami di ekowisata.” (wawancara, 16 juli 2024)

Lebih lanjutnya dorongan pada kolaborasi lembaga di Kalurahan akan digagas oleh BUMDesa untuk kesinergisan kepentingan. Purwadi selaku Dukuh Pancoh dalam wawancaranya diuraikan sebagai berikut;

“Kalurahan memiliki POKDARWIS yang diundang untuk mengajar setiap tiga bulan. Dididik tentang Ekowisata Pancoh, dan setiap tamu harus membayar seribu rupiah untuk berpartisipasi dalam BUMDesa setiap tahun. Pemerintahan kalurahan yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan dan fasilitas bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu, tujuannya adalah agar ekowisata mengembangkan kreativitasnya agar tetap eksis dan berkelanjutan. Strategi wisata sejauh ini belum ada. Namun, pada

tahun berikutnya, mungkin akan ada panggung budaya yang diserahkan ke BKK untuk dibangun. Saat ini, pembangunan Pancoh membutuhkan dana untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur.” (wawancara, 16 juli 2024)

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Supriadi selaku tokoh agama Padukuhan

Pancoh, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Secara umum, ada dampak positif dan negatif. Dari segi materi, tamu dari masyarakat dapat menjadi pemandu di homestay dan akan dikenakan biaya. Dari segi fisik, kebersihan dan kesehatan lingkungan terkait. Di sisi lain, homestay dan tamu memiliki aturan dan persyaratan khusus yang mengharuskan tamu menjadi keluarga atau anak-anak. Sejauh ini, kami telah terbiasa dengan keadaan di mana kami tetap bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Ekowisata mengambil langkah pemberian dengan membangun infrastruktur untuk diperbaiki guna meningkatkan minat wisatawan. Selain itu, rencana perbaikan telah dianggarkan.” (wawancara, 17 juli 2024)

Selanjutnya menurut Noto selaku Pengurus POKDARWIS Ekowisata

Pancoh, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Selain memberikan dukungan secara finansial, pemerintah Kalurahan juga membimbing dan membantu kami dalam setiap tahap pengelolaan ekowisata ini. Salah satunya adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kami dalam mengelola ekowisata. Selain itu, pemerintah kota juga menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, toilet umum, dan tempat parkir. Selain itu, mereka membantu dalam mempromosikan dan mempromosikan Ekowisata Pancoh.” (wawancara, 18 juli 2024)

Selanjutnya, Menuk selaku tokoh perempuan dalam wawancaranya sebagai

berikut;

“Dengan membangun beberapa fasilitas dan mendorong masyarakat sekitar, pemerintah Kalurahan membantu mengembangkan ekowisata. Selain itu, dorongan dari pemerintah daerah untuk melibatkan swasta dalam CSR-nya untuk membantu infrastruktur pendukung ekowisata. Tujuannya adalah agar fokus pada pengelolaan ekowisata dapat bertahan lama dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.” (wawancara, 19 juli 2024)

Kesimpulan peneliti dalam wawancara dengan beberapa responden

bahwa. Pembentukan POKDARWIS ialah buah dari rintisan pembangunan ekowisata awal berdirinya, dimana di tahun 2014 skala

pengembangan, pembangunan dan pengelolaan di skala prioritasan. Dengan beberapa unit usaha dan pelatihan bagi masyarakat harapan untuk menopang keberlanjutan ekowisata dan alam yang ada di Kalurahan Girikerto. Lebih lanjut pemerintah Kalurahan memberi fasilitas baik fisik dan non fisik. Ada penyertaan modal untuk dikembangkan dan nantinya akan di bagi hasil dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata di padukuhan. Dengan Skema pembagian hasil ekowisatanya dibagi antara POKDARWIS selaku kelompok yang langsung mengelola di padukuhan dengan BUMDesa selaku kepanjang tanganya kalurahan. Sinergitas antar lembaga di harmoniskan guna kemajuan ekowisata, sedangkan untuk hasil dari wisata itu dibagi dengan pemerintah kalurahan. Pemuda kalurahan harus di dorong demi generasi muda untuk ikut berperan dalam manajemen ekowisata, dan juga perlu pemberian bantuan pada infrastruktur yang ada di ekowisata. Baik dari aspek pemberdayaan sampai fasilitas penunjang ekowisata, di sisi lainya strategi mengandeng perusahaan untuk mau mengeluarkan anggaran CSRnya dalam memfasilitasi ekowisata sangat baik dan terus di jaga keharmonisan strateginya. Selain itu, harapan besarnya ekowisata berdampak signifikan untuk kesejahteraan warga masyarakat Kalurahan Girikerto.

C. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai regulator dalam pengelolaan ekowisata Pancloh

Pemerintah Kalurahan Girikerto bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan peraturan kalurahan yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan ekowisata Pancloh. Peraturan ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti zonasi kawasan ekowisata, pembagian peran dan tanggung jawab antara berbagai pemangku kepentingan, standar pelayanan dan keamanan wisatawan, serta upaya perlindungan lingkungan dan konservasi alam.

Melalui peraturan ini, pemerintah desa menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Selanjutnya Pemerintah Kalurahan Girikerto mengemban tugas penting dalam regulator. kalurahan berwenang untuk mengeluarkan izin usaha terkait ekowisata dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata Pancloh. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi bagian integral dari peran regulasi Pemerintah Kalurahan Girikerto. Mereka perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi, serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata

Pancoh sejalan dengan kebijakan dan program pembangunan yang lebih luas. Selanjutnya peneliti wawancara dengan responden, peneliti akan mendalami bagaimana peran pemerintah untuk hadir sebagai regulator.

Peneliti hendak menguraikan hasil wawancaranya dengan Krisna Cahyana selaku Carik Girikerto, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Sebagai regulator, pemerintah Kalurahan Girikerto bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Ekowisata Pancoh berjalan sesuai dengan peraturan dan standar. Pembuatan kebijakan, pengawasan pelaksanaannya, dan penegakan hukum adalah semua bagian dari ini. Namun, peraturan kalurahannya belum ada di dalamnya. Ada hanya pedoman teknis untuk hasil, tata tertib, dan prioritas anggaran. Sebagai aturan tetap yang harus dipatuhi oleh semua pihak, hal ini akan dilakukan pada tahun ini. Hal ini seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan sangat penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dan kelestarian lingkungan. Ekowisata Pancoh menguntungkan masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat.” (wawancara 10 juli 2024)

Lebih lanjutnya peneliti mewawancarai Samirin selaku Kaur Pangripta diuraikan sebagai berikut;

“Desa wisata tidak diatur dalam undang-undang pemerintah kalurahan, tetapi dikelola langsung oleh BUMDesa. Oleh karena itu, Peraturan Ekowisata Kalurahan sedang kami buat untuk menjadi aturan utama Kalurahan. Selain itu, hanya terdapat peraturan manajemen dan pembagian hasil antara POKDARWIS dan BUMDesa serta peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Meskipun terdapat kekurangan aturan, ekowisata kami telah mencapai prestasi pengelolaan selama dua tahun berturut-turut. Kami juga menerima peringkat Desa Mandiri Budaya, dan kami memanfaatkan dan menggunakan dana keistimewaan yang ditujukan untuk masyarakat dan wisatawan. Pada tahun 2022 dan 2023, Ekowisata Pancoh dianugerahi peringkat pertama untuk pengelolaan tantangan internal dan eksternal, seperti persaingan dari destinasi wisata lainnya. Ekowisata biasanya menawarkan live in yang memberikan proses. Ekowisatanya biasanya menggabungkan pengalaman langsung dengan kehidupan masyarakat Pancoh.” (Wawancara, 11 juli 2024)

Sejalan dengan Pangcipta Kalurahan Girikerto, Suwarno selaku ketua BPKal Girikerto dalam pemaparanya dengan peneliti akan disampaikan sebagai berikut;

“Karena saya adalah ketua BPKal, saya yakin belum ada peraturan kalurahan yang dibuat. Selain itu, ini dapat digunakan sebagai referensi untuk didiskusikan dalam musyawarah Kalurahan untuk membuat peraturan kalurahan yang mengatur ekowisata Girikerto saat ini. Kita menempatkan ekologi di pusat komunitas. Hasil BUMDesa dan POKDARWIS kami menempatkan kami di urutan pertama pengelolaan ekowisata yang berhasil di DIY berkat kolaborasi dengan menjaga lingkungan. Untuk tetap kreatif tanpa merusak lingkungan adalah tantangan besar.” (wawancara, 11 juli 2024)

Selanjutnya, wawancara dengan Ketua BUMDesa Rudi Pramoko dalam wawancaranya akan diuraikan sebagai berikut;

“Namun, aturan yang dibuat oleh pemerintah kalurahan tidak memiliki aturan yang jelas. Dalam bentuk PERKAL Ekowisata, itu hanyalah diskusi. Dalam hal pelestarian alam, budaya, dan kontribusi untuk pengembangan ekonomi, PERKAL yang diharapkan sejalan dengan itu. Jika saat ini hanya ada aturan pembagian hasil, sementara pencapaian kami meraih penghargaan sebagai pengelolaan ekowisata terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempertahankan wisatawan untuk tumbuh pesat dan menciptakan inovasi tanpa merusak lingkungan sekitar adalah tantangan.” (wawancara, 15 juli 2024)

Selanjutnya dalam wawancara dengan Ngatijan, selaku Koordinator Unit Usaha Ekowisata Pancuh pembahasanya sebagai berikut;

“Tidak ada aturannya karena ekowisata sudah kembali ke dalam dirinya sendiri. Namun, karena ekowisata menggunakan tanah kas Desa, izin alih fungsi diperlukan dengan izin pemerintah kalurahan, dan aturan untuk hasil berada di tangan Kalurahan. Jika Kalurahan ingin membuat peraturan, itu jelas mengarah pada pelestarian alam. sementara Ekowisata Pancuh sekarang menjadi ekowisata mandiri dan juara satu provinsi. Oleh karena itu, ekowisata ini sudah dapat mencapai tingkat nasional. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan manajemennya seperti perusahaan adalah tantangan besar.” (wawancara, 15 juli 2024)

Dalam wawancara lanjutan, peneliti mewawancara Yunita selaku Bendahara BUMDesa, dalam wawancaranya dijelaskan sebagai berikut;

“Menurut pendapat saya, karena saya baru menetap selama dua tahun, belum ada undang-undang ekowisata yang jelas, hanya fokus pada hasil pengelolaan. Selain itu, para pengurus BUMDesa yang ada berharap ada PERKal yang mengatur ekowisata secara khusus. Selain itu, harapannya sejalan dengan peningkatan ekonomi sambil mempertahankan kelestarian alam. Kita mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pengelolaan ekowisata se nasional karena kami adalah juara satu provinsi. Tugasnya adalah menjadi profesional dan terus berinovasi untuk menjaga lingkungan.” (wawancara, 16 juli 2024)

Selanjutnya wawancara dengan Purwadi selaku Dukuh Pancuh, dalam wawancaranya dijelaskan sebagai berikut;

“Tidak ada peraturan, itu hanya diskusi. Tujuan kami di pedesaan adalah untuk mendorong PERKal tentang ekowisata untuk menangani kelestarian alam, nilai budaya, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mencapai prestasi yang mencapai gelar juara pertama pengelolaan dan pengembangan ekowisata se-DIY dan berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat nasional, diperlukan komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekowisata padukuhan pancuh.” (wawancara, 16 juli 2024)

Selanjutnya wawancara dengan Supriadi selaku tokoh agama, dalam wawancaranya diuraikan sebagai berikut;

“Sejauh yang saya ketahui, belum ada aturan karena saya tidak pernah diberitahu atau diundang untuk membahas peraturan ekowisata di musyawarah Kalurahan. Misalnya, bibit dibawa ke dalam setiap makrab atau camping untuk ditanam atau reboisasi. Di sisi lain, dalam pemberdayaan, pemuda bertanggung jawab untuk memandu dan memang seharusnya ada aturan untuk membuat mekanismenya jelas. Untuk kepentingan bersama, terutama karena ekowisata provinsi ini sangat baik dan sering menjadi juara tingkat provinsi, mereka harus berkolaborasi untuk memajukan pengelolaannya lebih maju dan berkembang pesat.” (wawancara, 17 juli 2024)

Selanjutnya menurut Noto selaku Pengurus POKDARWIS Ekowisata Pancuh, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Tidak ada aturan kalurahan khusus untuk Ekowisata Pancuh. Saya berharap aturan ini segera dibuat karena sangat penting. untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan organisasi kita. Kita dapat

menjaga dengan benar. Dia harus memiliki semangat kemajuan yang bekerja sama dan berprestasi di tingkat nasional. Untuk membuatnya jelas secara profesional, pentingnya manajemennya harus tercermin dari unsur dan Kalurahan yang ada di dalamnya. "(wawancara, 17 juli 2024)

Kesimpulan dari beberapa responden yang di wawancara peneliti bahwa.

Pemerintah Kalurahan Girikerto kurang berpartisipasi dalam musyawarah dan pembuatan kebijakan untuk Ekowisata Pancuh karna justru yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan di Padukuhan Pancuh justru sekelompok masyarakat diPadukuhan Pancuh saja. Dasar hukum aturan kalurahan berbentuk PERKal belum di buat yang khusus ekowisata, akan dibuat di semester anggaran smester depan. Sementara luang lingkupnya menyertakan pola kesinergisan antara ekologi dan agraria. Selanjutnya baru ada aturan bersama dari tata tertib menjaga ekowisata dan bagi hasil dari ekowisata. Di dalam prestasinya tahun 2022-2023 Kalurahan Girikerto, mendapat penghargaan juara satu se-DIY, dalam hal pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Hambatan yang mendorong perbaikan lebih pada menciptakan inovasi baru untuk pengelolaan ekowisata.

Selanjutnya prestasi yang dibuat oleh pengurus ekowisata iiiialah juara satu tingkat provinsi dalam hal pengelolaan ekowisata, dengan tantangan inovasinya terus menerus dan mempertahankan lingkungan tetap asri. Prestasi terbaik pengelolaan ekowisata se-DIY. Untuk kebermanfaatan dan mekanisme operasionalnya jelas. Disamping itu juga menaikkan daya tawar di kancah nasional bahwa keterlibatan unsur semua pihak hadir dalam pengelolaan ekowisata yang dibangun di Kalurahan Girikerto.

D. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata Pancloh

Pemerintah Kalurahan Girikerto memiliki peran penting sebagai mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata Pancloh. Peran ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, di mana pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pengelolaan dan pengembangan.

Sebagai mitra kerja, Pemerintah Kalurahan Girikerto terlibat langsung dalam berbagai aspek pengelolaan ekowisata Pancloh. Mereka bekerja sama erat dengan pengelola ekowisata, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan yang harmonis dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup perencanaan bersama, implementasi program, dan evaluasi hasil. Seperti pemaparan diatas peneliti hendak menguraikan hasil wawancara dengan Krisna Cahyana selaku Carik Girikerto sebagai berikut;

“Oleh karena itu, sebagai mitra kerja, Pemerintah Kalurahan Girikerto aktif bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan dan mengawasi Ekowisata Pancloh. Untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak, kami bekerja sama dengan masyarakat, kelompok usaha, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Kami memandang masyarakat sebagai mitra penting untuk mengelola ekowisata. Penyusunan rencana bersama, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembagian tanggung jawab untuk operasional ekowisata adalah semua contoh jenis kolaborasi ini. masyarakat diberi kesempatan untuk membuat keputusan penting dan mengelola beberapa aspek ekowisata, seperti homestay, pemanduan wisata, dan kerajinan tangan. Selain itu, Mendirikan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), yang terdiri dari warga lokal. POKDARWIS membantu mengembangkan ekowisata Pancloh, menawarkan layanan kepada pengunjung, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kami juga membantu masyarakat berpartisipasi dalam ekowisata melalui program pelatihan keterampilan. Dengan CSR, kami bekerja sama dengan sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur ekowisata dan

membangunnya. Beberapa perusahaan telah membantu dalam pembangunan fasilitas umum seperti area parkir, toilet, dan jalan akses. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan, terutama universitas, sangat penting. Untuk meningkatkan pengelolaan ekowisata, mereka berkontribusi pada penelitian, pelatihan, dan pelatihan.” (wawancara 10 juli 2024)

Sejalan dengan Krisna Cahyana, peneliti mewawancarai Samirin selaku Kaur Pangripta dalam penyampaianya dijelaskan sebagai berikut;

“Pelatihan dasar telah diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk POKDARWIS, UMKM, kelompok perempuan, pemuda padukuhan, dan lembaga unsur yang ada di kalurahan. memberi tahu orang tentang pentingnya ekowisata dan dasar pengembangannya untuk bekerja sama. Kami mengalokasikan uang untuk promosi di media cetak dan websitenya, beberapa di antaranya melibatkan kerja sama dengan travel tour, menggunakan Instagram, dan membuat diskon berkunjung. Karena daya tariknya yang luas, itu benar. Meskipun ada kekurangan, kami terus berusaha lebih baik.” (Wawancara, 11 juli 2024)

Sejalan dengan carik Kalurahan, BPKal yang diwakili ketuanya, Suwarno dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Di bawah pengawasannya, pelatihan UMKM diberi untuk mendorong penjualan produk mereka melalui ekowisata. BUMDesa juga diberi pelatihan dan POKDARWIS untuk menjadi lebih profesional dalam menjalankan unit usahanya. Sementara itu, promosi ekowisata juga dilakukan dengan keras dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun promosi di media sosial masih mengalami kesulitan, meskipun ekowisata telah diposting di Instagram dan beberapa media lainnya. Harus dikembangkan dengan menggunakan situs web yang intens dan mungkin menggunakan selebgram dengan banyak pengikut untuk membuatnya terkenal dan dipromosikan.” (Wawancara, 11 juli 2024)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BUMDesa Rudi Pramoko, dalam wawancaranya dijelaskan sebagai berikut;

“Pemerintah Kalurahan Girikerto sangat mendukung upaya masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola ekowisata. Secara teratur, kami memberikan pelatihan dan lokakarya kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang pariwisata, termasuk pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan pengembangan produk lokal. Kami juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekowisata, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasilnya.

Dengan bekerja sama dengan dinas pariwisata setempat, kalurahan sangat aktif dalam mempromosikan ekowisata Pancoh dan mempromosikan melalui berbagai pameran dan acara pariwisata. Kami juga menggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak wisatawan. Pengelola ekowisata dan pihak kalurahan bekerja sama dengan agen perjalanan dan platform online untuk mendorong lebih banyak pengunjung.” BUMDesa (wawancara, 15 juli 2024)

Sejalan dengan ketua BUMDesa, Ngatijan selaku Koordinator Unit Usaha Ekowisata Pancoh dalam wawancaranya menyampaikan sebagai berikut;

“Benar bahwa pemerintah kalurahan hadir untuk membantu kami dalam pengelolaan ekowisata, memberikan dana untuk promosi, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata, Tour, dan Transportasi. Harapan besar kita bersama adalah pengelolaannya profesional seperti perusahaan. Selain itu, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan di kalurahan.” (wawancara, 15 juli 2024)

Selanjutnya wawancara akan menuju pada Purwadi selaku Dukuh Pancoh, dalam wawancaranya akan dijelaskan sebagai berikut;

“Oleh karena itu, pemerintah kalurahan mendukung promosi pengelolaan ekowisata dengan membangun kemitraan ekowisata dan bekerja sama dengan dinas pariwisata dan UMKM, serta melakukan pembinaan dan pelatihan baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti situs web pemerintah kalurahan. Selain itu, pemerintah Kalurahan mendukung promosi pengelolaan ekowisata dengan membangun kolaborasi dengan tour dan travel serta memiliki website publikasi wisata.” (wawancara, 16 juli 2024)

Selanjutnya peneliti mewawancarai yunita selaku Bendahara BUMDesa dalam wawancaranya diuraikan sebagai berikut;

“Seperti pelatihan, kalurahan bertanggung jawab untuk menyediakan bekal kepada kami, dan setelah itu, mereka hanya bertanggung jawab atas pengawasan, pengawasan, dan pelatihan. Sisanya berada di tangan kita. Untuk mengembangkan ekowisata, satu sisi juga bekerja sama dengan pihak terkait. Semua orang yang bekerja sama akan menghasilkan prestasi. Jadi, mereka bekerja sama untuk mengembangkan ekowisata. Mereka berharap kemajuan ekowisata dan manajemen yang baik, serta promosi yang konsisten untuk menarik wisatawan.” (wawancara, 16 juli 2024)

Selanjutnya peneliti mewawancara Supriadi selaku tokoh agama dalam wawancaranya disampaikan sebagai berikut;

“Pemberdayaan masyarakat didukung oleh pemerintah Kalurahan Girikerto. Melibatkan warga setempat dalam kemajuan dan pengelolaan ekowisata adalah salah satu upaya yang dilakukan. Tujuannya agar masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan ekowisata. Untuk meningkatkan keterlibatan dan keuntungan masyarakat lokal dalam pengelolaan Ekowisata Pancuh, pemerintah Kalurahan Girikerto telah merencanakan berbagai program dan kegiatan, termasuk video pelatihan dan promosi Desa Ekowisata Pancuh secara virtual. Selain itu, pemerintah juga berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan homestay serta mendorong masyarakat untuk mendukung kelancaran ekowisata. Untuk mengelola Ekowisata Pancuh, pemerintah Kalurahan Girikerto bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan LSM, Departemen Pariwisata, Tour, dan Travel, antara lain, adalah contohnya. Untuk mempromosikan ekowisata kami melalui media sosial dan media cetak, kami fokus pada Instagram dan Facebook.” (wawancara, 17 juli 2024)

Selanjutnya menurut Noto selaku Pengurus POKDARWIS Ekowisata Pancuh, dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Karena kalurahan menjadi mitra kerja dalam pengembangan ekowisata, beberapa kemitraan terbentuk. Penyebaran ekowisata dibantu oleh MOU dengan Tour dan Travel serta beberapa Departemen seperti Koperasi dan Pariwisata. Program dengan pemerintah bersama terus memberi tahu orang-orang tentang pentingnya ekonomi yang dibangun oleh lembaga dan menawarkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola wisata. Dalam rencana masa depan, dia berencana untuk mendirikan organisasi baru yang saling berhubungan secara ekonomi dengan melibatkan kelompok UMKM, kelompok perempuan, dan pemuda di Kalurahan.” (wawancara, 18 juli 2024)

Wawancara selanjutnya, dengan Menuk, selaku tokoh perempuan. Dalam wawancaranya akan diuraikan sebagai berikut;

“Karena saya juga punya stand jualan di Ekowisata Pancuh, saya merasa kemitraan dengan kalurahan benar karena kami mengebor untuk meningkatkan tingkat penjualan pengean melalui ekowisata. Selain itu, pemerintah kalurahan memberikan insentif dengan mempromosikan barang-barang mereka ke luar kalurahan melalui iklan cetak dan media sosial. Kami juga sangat senang bekerja sama dengan beberapa lembaga, seperti Dinas Koperasi. Dinas sigap membantu kami memasarkan produk lokal dan memberikan pelatihan dasar

kewirausahaan. Orang-orang memiliki harapan untuk maju dan memanfaatkan peluang yang ada.” (wawancara, 19 juli 2024)

Kesimpulan wawancara dari beberapa responden bahwa, kemitraan kerja di dalam internal Kalurahan berjalan positif, dimana semua elemennya di rangkul dan juga diberdayakan. Beberapa mitra kerjanya pun di dorong untuk bersumbangsih kepada ekowisata yang ada. Dan juga banyak diantaranya pola kemitraannya dengan peneliti dan kampus-kampus di Yogyakarta untuk mendukung jalanya pengelolaan, pengembangan dan kemajuan ekowisata.

Dilain sisi Pemerintah Kalurahan Pancoh berperan aktif membina, mengontrol dan mengawasi pengelolaan ekowisata, dan juga mendorong kemitraan dengan DINAS Pariwisata dan Tour dan travel yang ada. Sementara, promosinya meliputi media sosial dan cetak.

Dengan harapan mampu profesional pengelolaan wisatanya. Hambatan dari pengelolaan ekowisata ini pada kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat untuk aktif terlibat di dalam ekowisata diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan juga, ada rencana pembuatan lembaga baru untuk melibatkan seluruh unsur di dalam Kalurahan terlibat aktif, disatu sisi lain promosi dan kolaborasi dengan pihak lainya demi kemajuan ekowisata. Faktor penghambat lainya dari kolaborasi bersama DINAS dan pemangku kepentingan, masyarakat kurang aktif dalam mendorong kemauan untuk maju dan berkembang. Padahal upaya terus dilakukan kalurahan tetapi sangat minim proses intensitas dalam sumbangsihnya masyarakat pada program-program yang dibuat.

E. Analisis Peran Pemerintah dalam pengembangan Ekowisata Pancoh

Pemerintah Kalurahan Girikerto telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan Ekowisata Pancoh. Sebagai fasilitator, regulator, dan mitra kerja dalam pengelolaan ekowisata, pemerintah kalurahan telah memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, pelatihan, dan akses ke modal. Selain itu, mereka telah membentuk badan pengelola ekowisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kelompok Sadar Wisata POKDARWIS dan Badan Usaha Milik Desa BUMDesa. Dalam perannya sebagai regulator, meskipun belum ada Peraturan Kalurahan (PERKal) yang spesifik mengatur tentang ekowisata, pemerintah Kalurahan telah menetapkan beberapa aturan dasar seperti tata tertib dan mekanisme bagi hasil. Namun, ketiadaan PERKal yang komprehensif mengenai ekowisata menjadi salah satu tantangan yang perlu segera diatasi untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan Ekowisata Pancoh.

Sebagai mitra kerja, Pemerintah Kalurahan Girikerto telah menunjukkan upaya yang baik dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Mereka telah melibatkan masyarakat kalurahan, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dalam pengembangan ekowisata. Pemerintah Kalurahan juga aktif dalam mempromosikan Ekowisata Pancoh melalui berbagai media dan kerjasama dengan agen perjalanan. Upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama pemerintah kalurahan. Mereka telah menyelenggarakan berbagai pelatihan

dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola ekowisata. Ini mencakup pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan pengembangan produk lokal. Pemerintah kalurahan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekowisata.

F. Analisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran

Faktor pendukung utama terlihat dari komitmen pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan ekowisata. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran, pembentukan lembaga seperti POKDARWIS dan BUMDesa, serta upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Prestasi yang telah diraih, seperti penghargaan juara satu pengelolaan ekowisata se-DIY, menjadi bukti nyata keberhasilan awal dan sekaligus motivator untuk pengembangan lebih lanjut. Keterlibatan aktif masyarakat lokal juga menjadi modal sosial yang berharga, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan ekowisata.

Namun, di balik faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hambatan signifikan yang perlu diatasi. Absennya Peraturan Kalurahan (PERKal) yang spesifik mengatur ekowisata menjadi kelemahan mendasar dalam tata kelola. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensial konflik, terutama terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat antara berbagai pemangku kepentingan. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen verbal dan implementasi kebijakan yang konkret.

Lebih lanjut, meskipun telah ada upaya pemberdayaan masyarakat, terlihat adanya keterbatasan dalam hal konsistensi dan keberlanjutan program. Hal ini dapat menghambat peningkatan kapasitas jangka panjang masyarakat kalurahan dalam mengelola ekowisata secara profesional. Fenomena ini mungkin terkait dengan keterbatasan sumber daya atau kurangnya perencanaan strategis jangka panjang.

Koordinasi antar pemangku kepentingan yang perlu ditingkatkan juga menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang optimal. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih program atau bahkan konflik kepentingan yang kontra produktif bagi pengembangan ekowisata. Situasi ini mungkin mencerminkan adanya ego sektoral atau kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif.

Dalam aspek promosi dan peran, terlihat adanya keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Di era digital saat ini, hal tersebut dapat sangat menghambat visibilitas dan daya tarik ekowisata Pancoh di mata calon wisatawan. Selanjutnya dalam kesimpulan peneliti bahwa, Pemerintah Kalurahan Girikerto tidak di libatkan dalam struktur yang ada di Ekowisata Pancoh sehingga peran pemerintah kalurahan tidak maksimal pada Ekowisata Pancoh.

Pemerintah Kalurahan Girikerto hanya menjadi Wasit dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh karna justru yang bermain dalam pengelolaan ekowisata hanya sekolompok orang saja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemerintah Kalurahan Girikerto memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Ekowisata Pancoh. Sebagai pemerintah mereka bertanggung jawab sebagai fasilitator, regulator dan mitra kerja dalam kegiatan ekowisata di Kalurahan Girikerto. Salah satu peran utama Pemerintah Kalurahan Girikerto adalah sebagai fasilitator dan mitra kerja pengelolaan ekowisata.

1. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengembangan Ekowisata Pancoh

Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam pengembangan Ekowisata Pancoh belum sepenuhnya optimal. Sebagai fasilitator, pemerintah Kalurahan telah mendukung pengembangan infrastruktur dasar dan memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan. Namun, peran sebagai regulator lemah karena belum adanya peraturan Kalurahan (PERKal) khusus yang mengatur ekowisata. Regulasi yang ada baru sebatas panduan teknis mengenai bagi hasil dan tata tertib. Meskipun demikian, ada kesadaran dan keinginan kuat dari berbagai pihak untuk segera merumuskan PERKal khusus ekowisata guna menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan budaya Kalurahan.

Dalam perannya sebagai mitra kerja, pemerintah Kalurahan telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti POKDARWIS, BUMDesa, UMKM dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini telah menghasilkan prestasi signifikan, teruk juara pertama pengelolaan ekowisata tingkat DIY pada

tahun 2022-2023. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu mempertahankan inovasi dan pertumbuhan wisatawan tanpa merusak lingkungan, serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan.

meskipun telah menunjukkan peran yang cukup baik sebagai fasilitator dan mitra kerja, Pemerintah Kalurahan Girikerto perlu segera memperkuat perannya sebagai regulator. Penetapan PERKal khusus ekowisata menjadi prioritas untuk mendukung prestasi yang telah dicapai, menjamin keberlanjutan Ekowisata Pancuh, dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Dengan demikian, sinergi antara peran fasilitator, regulator, dan mitra kerja dapat terwujud secara lebih optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sambil tetap menjaga kelestarian alam dan budaya setempat.

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Kalurahan Girikerto dalam pengembangan Ekowisata Pancuh.

Pelaksanaan peran Kalurahan Girikerto dalam pengembangan Ekowisata Pancuh memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat pengembangan Ekowisata.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama adalah adanya kemitraan yang kuat antara pemerintah Kalurahan dengan berbagai pihak, teruk masyarakat Kalurahan, POKDARWIS, BUMDesa, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi. Pemerintah Kalurahan aktif dalam memberikan

pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan ekowisata. Selain itu, dukungan promosi melalui media sosial, website, dan kerjasama dengan agen perjalanan turut mendorong perkembangan ekowisata.

b. Faktor Penghambat

Kurangnya partisipasi aktif dari sebagian masyarakat dalam memanfaatkan peluang dan program yang ditawarkan oleh pemerintah Kalurahan. Meskipun upaya pemberdayaan terus dilakukan, ada kendala dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat secara optimal dalam pengembangan ekowisata. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal peran digital, dimana penggunaan media sosial dan website belum maksimal untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Kalurahan Girikerto telah menunjukkan peran yang proaktif dalam pengembangan Ekowisata Pancoh dengan berbagai program dan kemitraan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dan optimalisasi strategi peran digital. Peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat, serta pengembangan kapasitas dalam pengelolaan media promosi online, menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi Ekowisata Pancoh di mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Girikerto dalam Pengelolaan Ekowisata Pancoh adalah:

1. Meningkatkan infrastruktur jalan, fasilitas di dalam tempat wisata seperti pendopo, CCTV, pusat informasi, jaringan komunikasi, ruang publik untuk kegiatan sosial dan prasarana pendukung lainnya untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan.
2. Terus meningkatkan pelatihan dan *workshop* pengembangan ekowisata kepada pengelola ekowisata, UMKM, dan unsur masyarakat lainnya. Disesuaikan dengan tren terkini dalam industri pariwisata dan ekowisata. Dengan melibatkan profesional dan praktisi yang berpengalaman sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan lebih dalam.
3. Memanfaatkan media digital lebih kreatif untuk promosi dan menggandeng *influencer* dan *blogger* yang punya pengaruh besar untuk berkolaborasi mengembangkan Ekowisata Pancoh.
4. Segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Kalurahan (PERKal) khusus untuk ekowisata guna memperkuat peran regulasi dan memberikan kerangka hukum yang jelas.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, LSM, DINAS Pariwisata, Swasta untuk mendukung kemajuan Ekowisata Pancoh.

Daftar Pustaka

- Amelia, Rizki, and Adella Patricia. 2021. “Volume 5, Nomor 1, January 2021, *Journal of Tourism and Creativity* P-ISSN: 2549-483X.” 5: 67–78.
- Anggoro Saputro, Arnaz, Yudi Dwi Saputra, and Guntum Budi Prasetyo. 2020. “analisis dampak covid-19 terhadap kesadaran masyarakat Dalam penerapan protokol kesehatan.” *Jurnal Porkes* 3(2): 81–92.
- Astomo, Putra. 2014. “penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (64): 401–20.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. “pemberdayaan masyarakat setelah perubahan menjadi desa mandiri budaya.” *NBER Working Papers*: 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Chester L. Hunt dan Paul B. Horton, 1996. sosiologi, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Heriyanto, Debbie Yuari Siallagan, and Sulaiman. 2020. “peran pemerintah dalam pengembangan teluk berdiri sebagai objek ekowisata di kabupaten kuburaya kalimantan barat.” *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research* 2(02): 8–16.
- Hermawan, Hary. 2016. “dampak pengembangan desa wisata nglanggeran Terhadap ekonomi masyarakat lokal.” *Jurnal Pariwisata* 3(2): 105–17.
- Jihan Novita Sari, and Sudirman L. 2022. “Peran pemerintah kota parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.” *Jurnal sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1(2): 77–87.
- Junaid, Ilham et al. 2020. “Pengelolaan kampung nelayan sebagai desa wisata di kabupaten majene, sulawesi barat.” *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)* 2(1): 17–24.
- Komariah, Neneng, Encang Saepudin, and Pawit M. Yusup. 2018. “pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.” *Jurnal Pariwisata Pesona* 3(2).

- Leniwati, Driana, and Aliya Nur Aisyah. 2021. “pengelolaan ekowisata boonpring. oleh badan usaha milik desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(2): 127–39.
- Mulyawan, Rahman. *sistem pemerintahan indonesia*. 2022.
- Nikodimus, Nikodimus, Gradila Apriani, and Petrus Atong. 2020. “peran pemerintah desa dalam pengembangan ekowisata danau jemelak.” *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 9(1): 67–75.
- Sari sasi gendro, dea aulya. 2022. LP2M UST Jogja *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013. Sudarman, Momon. 2013. profesi guru. Jakarta: Rajawali Pers
- Susanti, Amelia. 2021. “peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1(2): 1–13.
- Syaiful Ade Septemuryantoro. 2021. “potensi desa wisata sebagai alternatif destinasi wisata new normal.” *Media Wisata* 19(2): 186–97.

Lampiran 1

Daftar pertanyaan

Nama:

Usia:

Pendidikan:

Jabatan:

Pedoman wawancara Peran Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Ekowisata di Padukuhan Pancoh, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

1. Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai fasilitator dalam pengelolaan Ekowisata Pancuh

- a. Bagaimana Pemerintah Kalurahan terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Padukuhan Pancuh?
- b. Apa tanggung jawab dan peran utama Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan ekowisata?
- c. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan infrastruktur pendukung ekowisata, seperti jalan, toilet umum, atau tempat parkir?
- d. Apa harapan Pemerintah Kalurahan terkait pengelolaan ekowisata di depan?
- e. Apakah ada rencana atau strategi perbaikan yang diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas peran Pemerintah Kalurahan?

2. Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai regulator dalam pengelolaan Ekowisata Pancuh

- a. Apakah Pemerintah Kalurahan memiliki kebijakan atau peraturan tertentu terkait ekowisata di padukuhan pancuh?
- b. Bagaimana kebijakan tersebut mendukung pelestarian alam dan budaya serta pengembangan ekonomi lokal?
- c. Sejauh ini, apa prestasi utama yang telah dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan ekowisata?

d. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan peran regulator?

3. Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai mitra kerja dalam Pengelolaan Ekowisata Pancoh.

- a. Bagaimana Pemerintah Kalurahan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata?
- b. Apakah ada program atau kegiatan yang digagas untuk meningkatkan keterlibatan dan manfaat bagi masyarakat lokal?
- c. Bagaimana Pemerintah Kalurahan mendukung promosi dan peran ekowisata di Padukuhan Pancoh?
- d. Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga atau promosi melalui media sosial?
- e. Apa harapan Pemerintah Kalurahan terkait pengelolaan ekowisata di depan?
- f. Apakah ada rencana atau strategi perbaikan yang diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas peran Pemerintah Kalurahan

Lampiran 2

Foto dokumentasi



Dokumentasi dengan Pak Carik 2024



Dokumentasi dengan Ketua BPKal 2024



Dokumentasi dengan Ketua BUMDesa 2024



Dokumentasi dengan Kordinator Unit Usaha Pancoh 2024



Dokumentasi dengan pangripta 2024



Dokumentasi dengan Dukuh Pancoh 2024



Dokumentasi dengan Tokoh Agama 2024



Dokumentasi dengan Tokoh perempuan 2024



Dokumentasi dengan Bendahara BUMDesa 2024



Dokumentasi dengan POKDARWIS 2024